



Lima Tahun Maju Bersama

Capaian Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla



Lima Tahun Maju Bersama

Capaian Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla



Menyempurnakan Landasan Infrastruktur, Membangun Sumber Daya Manusia

PADA 17 Agustus lalu Indonesia memasuki 74 tahun kemerdekaan. Para pendiri Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa tujuan kita adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat ini adalah pijakan konstitusional kita untuk terus menerus membangun Indonesia.

Pada 20 Oktober 2019 ini juga, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menggenapkan 5 tahun masa pemerintahannya. Kita patut bersyukur bahwa kita telah juga sebagai bangsa menentukan kepemimpinan Negara dan Pemerintahan periode 2019-2024. Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin pada saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengambil estafet kepemimpinan bangsa.

Selama lima tahun, Pemerintahan Jokowi-JK berjibaku menghadapi tantangan pembangunan kontemporer dan mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia di berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat dalam pengerahan sumber daya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengakselerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi fisik kesatuan nasional, menghubungkan dusun, desa, dan kota, mempererat konektivitas antarprovinsi dan antarpulau seantero Nusantara.

Dari sudut penguatan semangat persatuan nasional, semangat senasib sepenanggungan, Pemerintah juga terus menerus meningkatkan belanja kesejahteraan sosial dasar, terutama pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Selain urusan pembangunan kontemporer, Pemerintah juga membangun berbagai dasar-dasar strategi kebijakan untuk menghadapi tantangan masa depan, baik yang sudah di depan mata maupun yang masih dalam prediksi.

Untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan disrupsi yang mengikutinya, untuk menghadapi bonus demografi, untuk menghadapi konsekuensi menjadi salah satu bangsa dengan ekonomi terbesar di dunia. Ini semua telah dimulai persiapannya, sehingga pemerintahan berikutnya dapat melanjutkan dengan lebih baik.

Buku laporan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran reflektif bagaimana kita bisa terus mengukur, memperbaiki, dan mengatasi ketinggalan dengan bangsa maju lainnya. Apa yang sudah dicapai hari ini dan apa yang sudah dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia ke depan. Maka itu, sejumlah pencapaian berdasarkan indikator pembangunan manusia dan agenda pemerintah ke depan penting diketahui masyarakat.

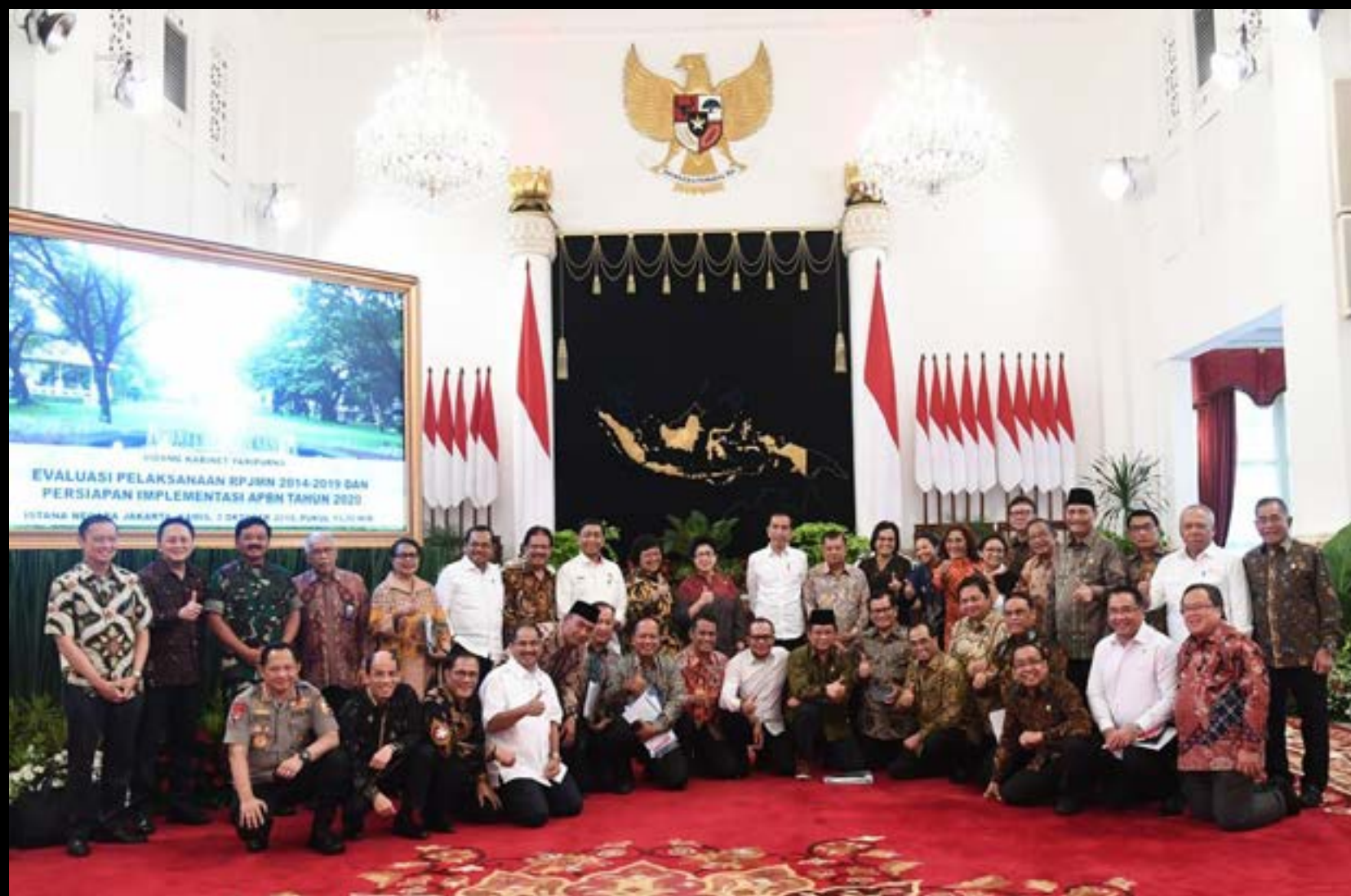
Dalam Visi dan Misi Pilpres 2019 maupun pidato tentang Visi Indonesia di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menjanjikan periode keduanya akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Setelah besar-besaran kita bangun infrastruktur di Tanah Air, tahapan besar dalam periode kedua pemerintahannya ialah pembangunan SDM. Pembangunan SDM ialah kunci kemajuan bangsa.

Fondasi SDM yang berkualitas juga akan menjadi modal intelektual dan sosial guna menyiapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global di masa mendatang. Untuk menuju 2030, pemerintah harus konsisten melaksanakan program jangka panjang untuk memacu produktivitas dan kualitas SDM berbasis riset dan teknologi.

Kami berharap, berbagai catatan pencapaian maupun kekurangan dalam membangun bangsa selama lima tahun terakhir ini dapat menjadi pembelajaran bersama. Apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini akan menjadi fondasi kebijakan untuk mempersiapkan bangsa Indonesia yang lebih maju lagi ke depan. Dengan terus menyempurnakan fondasi infrastruktur dan dengan pembangunan manusia yang unggul, bangsa Indonesia akan melangkah mencapai cita-cita kemerdekaan, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Kepala Staf Kepresidenan
Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P.



“Saya melihat selama lima tahun ini kita telah menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata, dan kita juga telah reformasi di bidang fiskal sehingga APBN kita menjadi semakin sehat dan semakin mandiri.

Kita juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris dalam melakukan percepatan di bidang infrastruktur. Kita juga telah memulai reformasi struktural, tetapi memang belum besar-besaran. Sehingga kita harapkan nanti di lima tahun ke depan kita akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan, prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini. Juga reformasi di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terutama pada masyarakat 40% ke bawah juga telah kita lakukan.

Kita melihat dalam lima tahun ini penguatan di bidang monitoring di bidang pengendalian eksekusinya di lapangan juga kita lakukan dengan baik, dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi. Saya melihat banyak hal yang telah berjalan karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan RPJMN tahun 2020-2024.

Terakhir, untuk persiapan implementasi APBN tahun depan, terhadap beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa 2020 merupakan tahun pertama pada periode pembangunan RPJMN 2020-2024 yang kita fokuskan pada pembangunan SDM secara besar-besaran tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah kita mulai lima tahun lalu. Karena itu, saya minta reformasi pemerataan kualitas pendidikan yang menjadi fondasinya sudah disusun selama lima tahun ini bisa kita lanjutkan. Juga program pelatihan kewirausahaan, entrepreneurship yang dimiliki masing-masing K/L bisa disinergikan.”

*Presiden Joko Widodo
pada Pidato Sidang Kabinet Paripurna Periode 2014-2019
Jakarta, 3 Oktober 2019*

Daftar Isi

Politik	16
Nawacita I Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	18
Politik Dalam Negeri	20
Stabilitas Kehidupan Demokrasi	
Pesta Demokrasi yang Merangkul	
Wajah Baru Pinggiran Negeri	
Makin Tangguh di Negeri Rawan Bencana	
Mewujudkan Pertahanan Nasional yang Kuat	
Ancaman Menurun, Indonesia Aman	
Politik Luar Negeri	36
Perlindungan Warga Negara,	
Indonesia Terpilih Menjadi Dewan Keamanan PBB	
Perdamaian Mancanegara	
Sejajar dengan Negara-Negara Maju	
Nawacita II Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Tepercaya	46
Tata Kelola Pemerintahan	48
Melawan Korupsi Tiada Henti	
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	
Nawacita III Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan	54
Pembangunan Tanah Papua	56
Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Papua	
Menuju Papua Sehat	
Menurunkan Kemiskinan di Papua	

Pembangunan Desa	64
Kinerja Dana Desa	
Menuju Desa Mandiri	
Penggunaan Dana Desa yang Tepat	
Nawacita IV Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	72
Penegakan Hukum yang Berkeadilan	74
Menguatkan Posisi Indonesia sebagai Negara Hukum	
Hukum yang Melayani Masyarakat	
Komitmen dalam Menjunjung HAM	
Melawan Narkoba	
Perlindungan HAM Perempuan dan Anak	
Ekonomi	86
Pengelolaan Ekonomi Makro	88
Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	
Harga-harga Terkendali & Daya Beli Masyarakat Terjaga	
Realokasi Subsidi Energi untuk Belanja yang Produktif	
Defisit Menurun, Anggaran Mandiri	
Penerimaan Pajak & Komitmen Membangun Daerah	
Utang Pemerintah Aman & Dikelola Dengan Hati-Hati	
Sektor Moneter & Keuangan Terkendali	

Nawacita V: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia	104
Mewujudkan Indonesia Sentris	106
Menuju Indonesia Terang	
BBM Satu Harga	
Palapa Ring Mempersatukan Indonesia	
Membuka Keterisolasian	
Menciptakan dan Menghubungkan Pusat-Pusat Ekonomi	
Untuk Kemakmuran Rakyat	
Pembangunan Indonesia-Sentris	
Ketahanan Pangan Meningkat, Kesejahteraan Petani Membaik	
Pembangunan Infrastruktur Pangan	
Nawacita VI: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional Sehingga Indonesia Maju dan Bangkit Bersama Bangsa Asia Lainnya	128
Produktivitas dan Daya Saing	130
Daya Saing Nasional Membaik	
Efisiensi Nasional Meningkatkan	
Revitalisasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi	
Sektor Industri Tetap Dominan	
Kemudahan Berusaha	140
Langkah Maju Deregulasi	
Kemudahan Berusaha Meningkatkan	
Indonesia Layak Investasi	
Realisasi Investasi Meningkatkan	

Nawacita VII: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik 150

Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 152

Geliat Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital Berkembang Pesat
Pariwisata adalah Primadona

Ekonomi Maritim 160

Kedaulatan Maritim
Pembangunan Ekonomi Maritim

Sosial Budaya **168**

Nawacita VIII: Melakukan Revolusi Karakter Bangsa 170

Pemenuhan Kebutuhan Dasar 172

Kualitas Manusia Indonesia
Pelaksanaan Bantuan Sosial
Reformasi Sistem Bantuan Sosial
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Menyelamatkan 1,7 Juta Balita dari Stunting
Menurunkan Stunting, Mencetak SDM Unggul
Akses Pendidikan Merata

Pemberdayaan, Inovasi, dan Prestasi 186

Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Ruang Perlindungan Anak
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Pembiayaan untuk yang Tak Terjangkau Perbankan
Prestasi Asian Games 2018 dan Optimisme Bangsa
Mengharumkan Nama Bangsa di Asian Para Games 2018
Perkembangan Riset dan Teknologi
Kesejahteraan Veteran
Prestasi Prajurit

Kearifan Lokal dan Keberlanjutan 206

Mewujudkan Indonesia Hijau
Menurunkan Emisi Melalui Kendaraan Bermotor Listrik
Menjaga Hutan Kita
Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan
Memastikan Hak Rakyat atas Tanah
Akses Perhutanan Sosial
Melindungi dan Memanfaatkan Potensi Laut

Nawacita IX: Memperteguh Kebinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia 224

Spirit Kebinekaan 226

Pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Meneguhkan Keberagaman melalui Upacara Kemerdekaan
Peningkatan Pelayanan Haji
Mudik 2019
Warisan Budaya Tak Benda
Festival Budaya

POLITIK

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan adalah usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum adalah prioritas dalam pembangunan di bidang politik.



Penari menampilkan Tarian Bendera Merah Putih sesuai acara Upacara Peringatan HUT ke-70 RI di Alun-Alun Kuala Kencana, Mimika, Papua (Foto: ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara



*Sejumlah anak suku Bajo melompat saat bermain di Desa Bajo Indah, Konawe, Sulawesi Tenggara.
(Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)*

Politik Dalam Negeri

Stabilitas politik dalam negeri terus dijaga dengan mewujudkan rasa aman serta memastikan ruang dialog untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi.

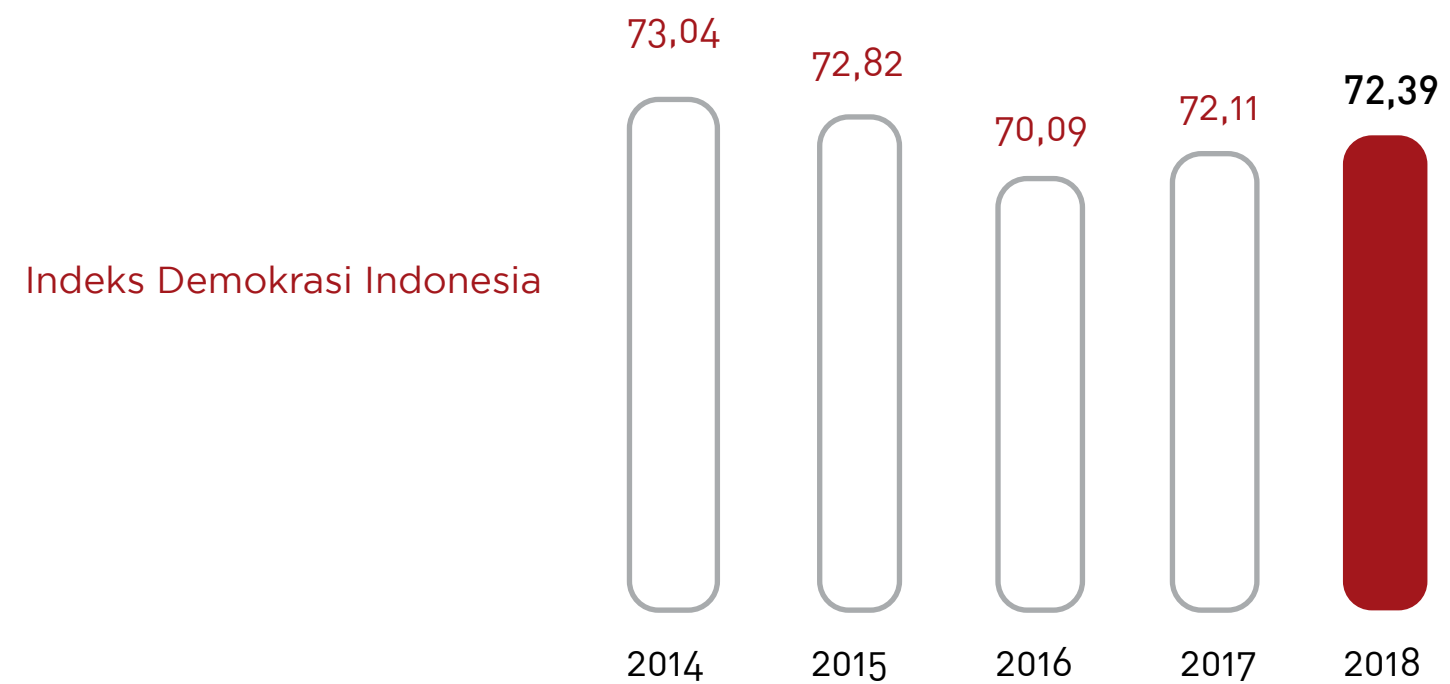


Petugas KPPS melayani warga yang akan memberikan hak suaranya di TPS 5 Pondok Benowo Indah di Surabaya, Jawa Timur (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

POLITIK DALAM NEGERI

Stabilitas Kehidupan Demokrasi

Kehidupan demokrasi Indonesia yang diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi terus berada di titik stabil.



Data: BPS



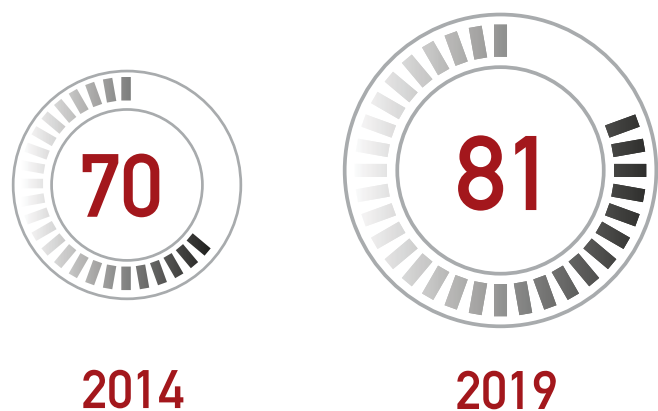
Sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) melakukan penghitungan suara Pemilu 2019. (Foto: ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul)

POLITIK DALAM NEGERI

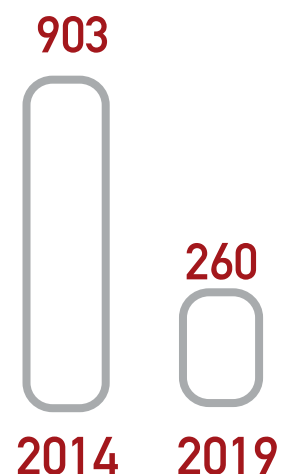
Pesta Demokrasi yang Merangkul

Partisipasi dalam pemilu adalah salah satu indikator dari kualitas demokrasi. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu serentak yang paling kompleks di dunia, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan perselisihan yang rendah.

Partisipasi Pemilih (%)



Jumlah Perselisihan Hasil Pemilu



Data: Komisi Pemilihan Umum



Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpelukan usai menyaksikan pesilat Hanifan Kusumah mempersembahkan medali emas di Asian Games 2018, (Foto: Sekretariat Presiden)



Personel TNI dan Polri mengawal distribusi logistik Pemilu serentak 2019 ke kawasan Taman Nasional Meru Betiri Dusun Bandelait, Desa Andongrejo, Tempurejo, Jember, Jawa Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Seno)



Polisi mengawal pendistribusian logistik Pemilu 2019 oleh sejumlah anggota Linmas ke TPS terpencil di Kecamatan Lamanen Selatan, di Kabupaten Belu, NTT. (Foto: ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

POLITIK DALAM NEGERI

Wajah Baru Pinggiran Negeri

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menyeluruh di semua titik perbatasan telah meningkatkan marwah Indonesia sebagai negara yang bermartabat dan berdaulat.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 2015-2019



Data: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

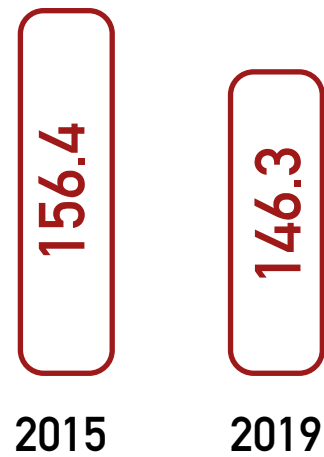


Sejumlah warga berfoto di depan Tugu Garuda Pancasila di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalbar. (Foto: ANTARA FOTO/HS Putra)

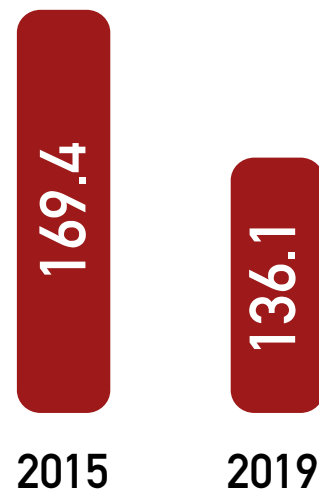
Makin Tangguh di Negeri Rawan Bencana

Informasi kepada publik terkait potensi kebencanaan disampaikan lebih dini dan penanggulangan kebencanaan ditangani lebih sigap.

Indeks Risiko Rata-Rata Nasional



Indeks Risiko Rata-Rata Prioritas Nasional



Data: BNPB

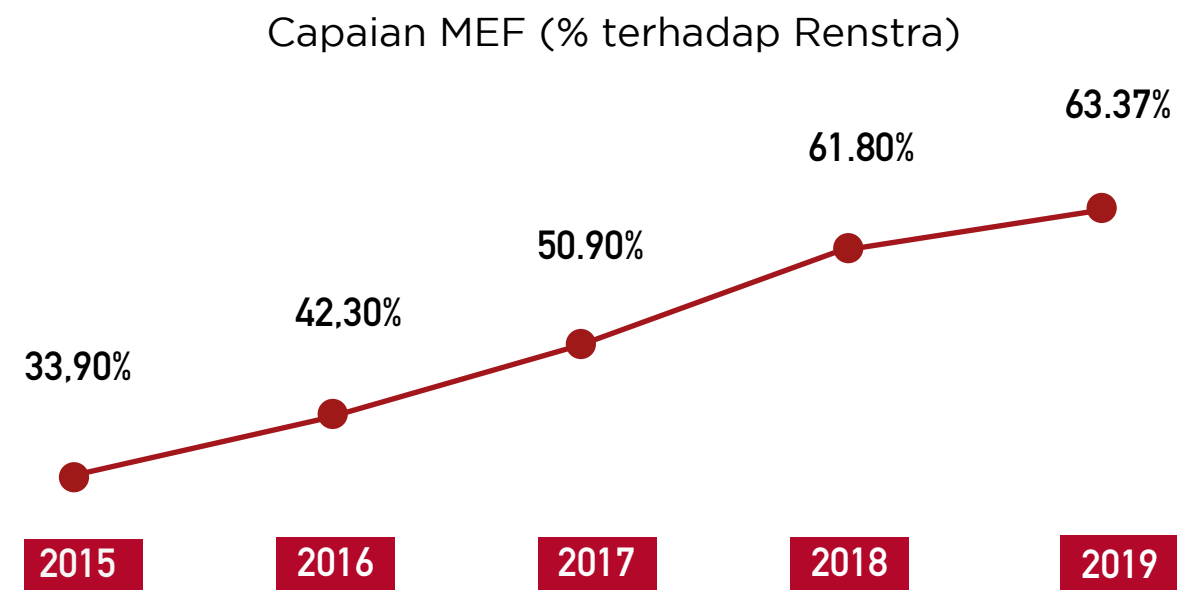


Kepala Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho memaparkan kronologis dan perkembangan bencana tanah longsor Banjarnegara, Jateng, di Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

POLITIK DALAM NEGERI

Mewujudkan Pertahanan Nasional yang Kuat

Dalam rangka pemenuhan *Minimum Essential Force II* (MEF II), kekuatan dan sistem persenjataan Indonesia mengalami peningkatan yang diwujudkan baik melalui kontribusi industri pertahanan nasional maupun kerja sama produksi luar negeri.



Data: Kementerian Pertahanan & Mabes TNI diolah



Medium tank buatan PT. Pindad melakukan manuver saat uji tembak di lapangan infanteri, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

POLITIK DALAM NEGERI

Ancaman Menurun, Indonesia Aman

Program pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi terus dilakukan secara komprehensif, sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.

Global Terrorism Index
(2018)

4.54

Pengaruh terorisme rendah

Global Peace Index
(2019)

1.784

Tingkat keamanan cukup tinggi



Terpidana kasus terorisme Umar Patek (kedua kanan) membawa bendera ketika menjadi pengibar bendera merah putih pada upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Data: Institute for Economics and Peace

Politik Luar Negeri

Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri serta kepemimpinan dalam perdamaian global dan kawasan menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.

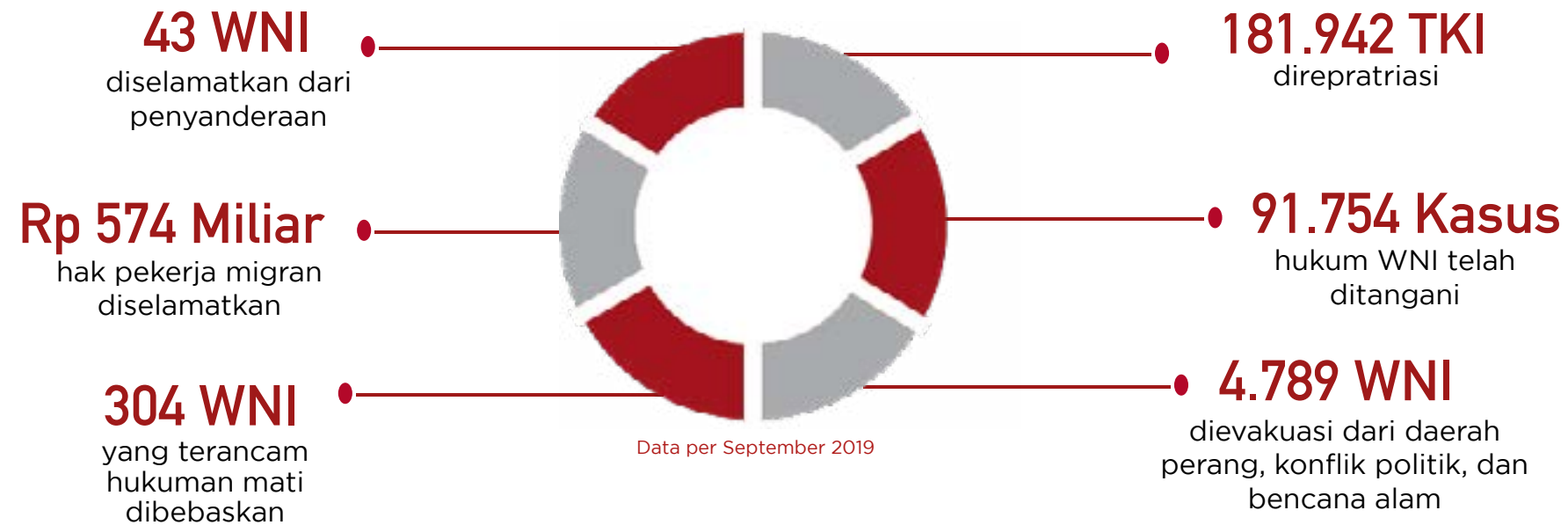


Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya E.S.Wicaksono)

POLITIK LUAR NEGERI

Perlindungan Warga Negara

Penanganan WNI yang bermasalah di luar negeri menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dari sisi jumlah warga yang ditangani masalahnya dan terselesaikan, maupun diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di mana WNI bekerja/tinggal.



Data: Kementerian Luar Negeri



Siti Aisyah (kiri), WNI terdakwa kasus pembunuhan terhadap Kim Jong Nam (saudara tiri Kim Jong Un), didampingi ibunya saat akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (Foto: TEMPO/Subekti)

POLITIK LUAR NEGERI

Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB

Pada tahun 2018, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Reaksi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (kanan), setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di markas besar PBB, New York, Indonesia meraih 144 suara dari 190 negara yang hadir. (Foto: AP/Mary Altaffer)

POLITIK LUAR NEGERI

Perdamaian Mancanegara

Indonesia berperan aktif dalam perdamaian Palestina dengan terus mendorong *two-state solution* serta menyebarkan bibit perdamaian di Afghanistan dengan menyelenggarakan pertemuan trilateral bersama Afghanistan dan Pakistan.



Mengadakan pertemuan untuk mendorong proses perdamaian dan mencari upaya bersama dalam menghentikan ekstremisme dan kekerasan



Penyelenggaraan Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan Indonesia dan Pakistan di Istana Bogor untuk mempertemukan ulama dari kedua negara guna membahas peran ulama dalam menghentikan kekerasan, ekstremisme dan menciptakan perdamaian. Pertemuan menghasilkan *Bogor Ulama Declaration of Peace*



Penandatanganan perjanjian hibah pembangunan klinik Indonesia Islamic Center yang akan digunakan untuk membantu penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan di Afghanistan

Data: Kementerian Luar Negeri



Indonesia menjadi pimpinan KTT OKI yang diselenggarakan di Jakarta, Maret 2016 (Foto: Kementerian Luar Negeri)



Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina (Foto: Kementerian Luar Negeri)

POLITIK LUAR NEGERI

Sejajar dengan Negara-Negara Maju

Indonesia dipandang maju pesat dalam penyelenggaraan acara berskala internasional, sekaligus menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam menyiapkan diri menjadi negara maju.

ANNUAL MEETINGS
2018 | indonesia
INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP



Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (Ketiga kiri), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kedua kanan), Ketua Pleno Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group Patteri Orpo (kedua kiri), foto bersama sebelum Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali (Foto: AM IMF-WBG/M Agung Rajasa)

2.
Membuat Pemerintah Selalu
Hadir dengan Membangun
Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, Demokratis,
dan Terpercaya.



*Petugas mengecat lambang Garuda Pancasila sebagai bagian dekorasi
jelang perayaan Natal di Gereja Katedral, Jakarta.
(Foto: ANTARA FOTO/ Sigid Kurniawan)*

Tata Kelola Pemerintahan

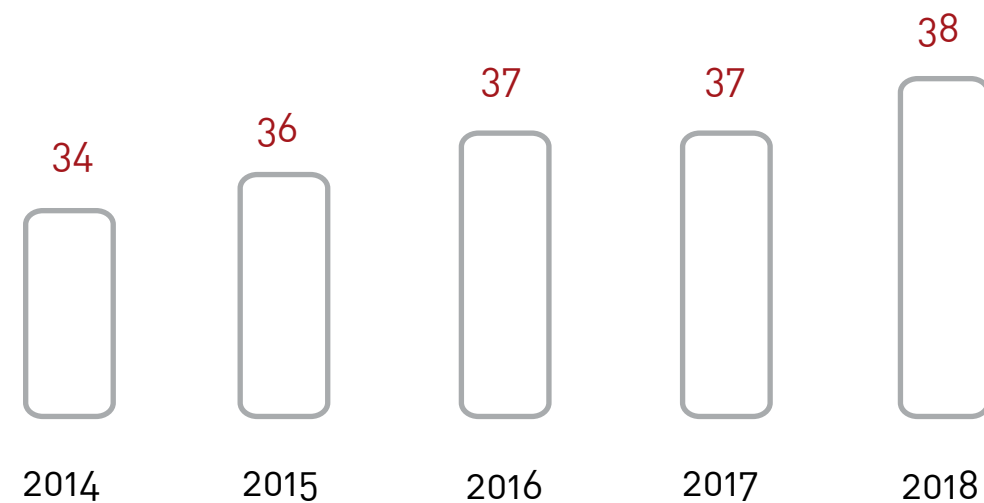
Tata kelola pemerintahan yang kredibel ditandai dengan membaiknya pencegahan korupsi dan penanganan kasus-kasus korupsi dan penguatan dalam sistem birokrasi yang makin transparan, efektif, dan dapat diandalkan.



Melawan Korupsi Tiada Henti

Indeks Persepsi Korupsi yang terus meningkat dan penyelamatan uang negara yang secara konsisten dilakukan merupakan bukti nyata komitmen terhadap anti korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI)



Data: Transparency International



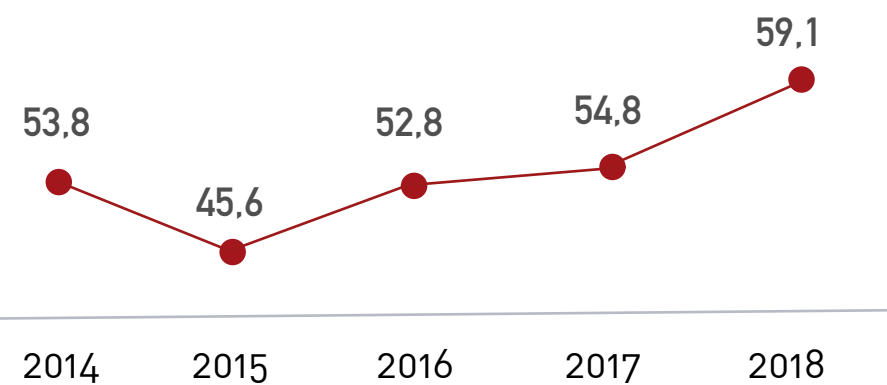
Sejumlah warga membawa poster dalam aksi Gerakan Sapu Koruptor e-KTP pada hari free day di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta (Foto: TEMPO/Feabri Husen)

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

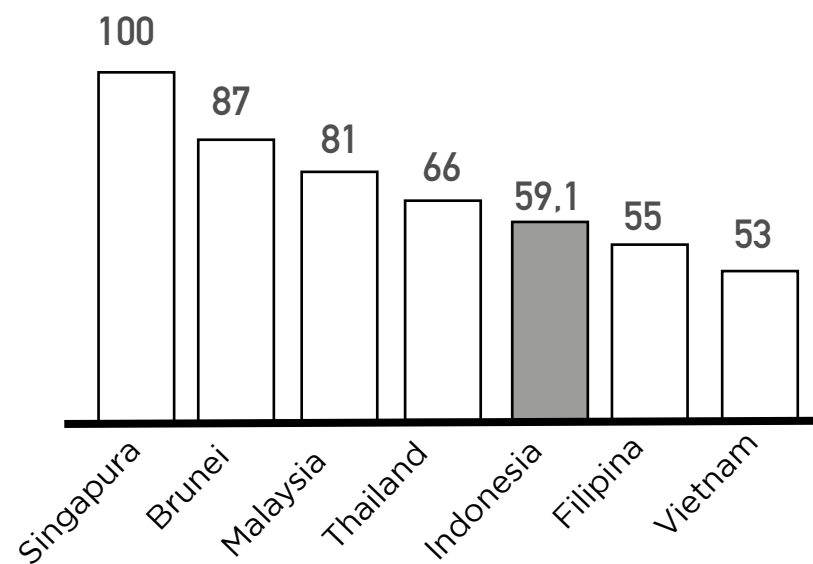
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Skor Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia terus meningkat. Tahun ini meningkat hampir 5 poin, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan pelayanan publik makin berkualitas dan makin efektif.

Skor Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia



Global Governance Index, 2019



Data: Kementerian PAN RB



Seorang wajib pajak melaporkan SPT tahunan melalui e-Filing di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

3.
Membangun Indonesia dari
Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah-daerah dan Desa dalam
Kerangka Negara Kesatuan.



*Foto udara proyek pembangunan Pelabuhan Gili Mas
di Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB
(Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)*

Pembangunan Tanah Papua

Percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua telah berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

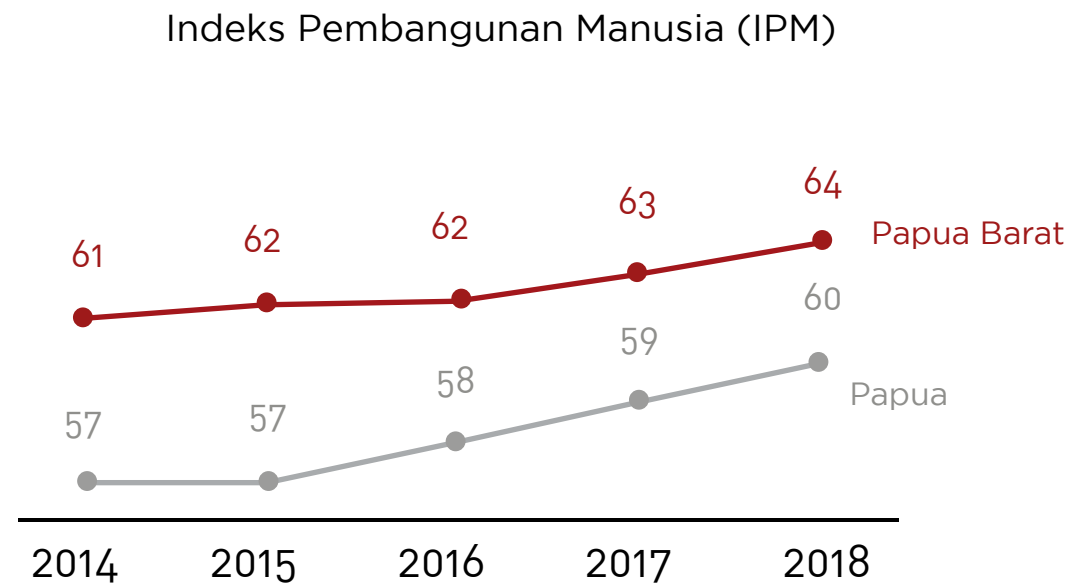


*Dua anak pengungsi banjir bandang Sentani bermain di di dalam tenda darurat yang didirikan di Bukit Harapan, Sentani, Jaya Pura, Papua
(Foto: ANTARA FOTO/ Zabur Karuru)*

PEMBANGUNAN TANAH PAPUA

Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Papua

Pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat merupakan program prioritas nasional dan berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.



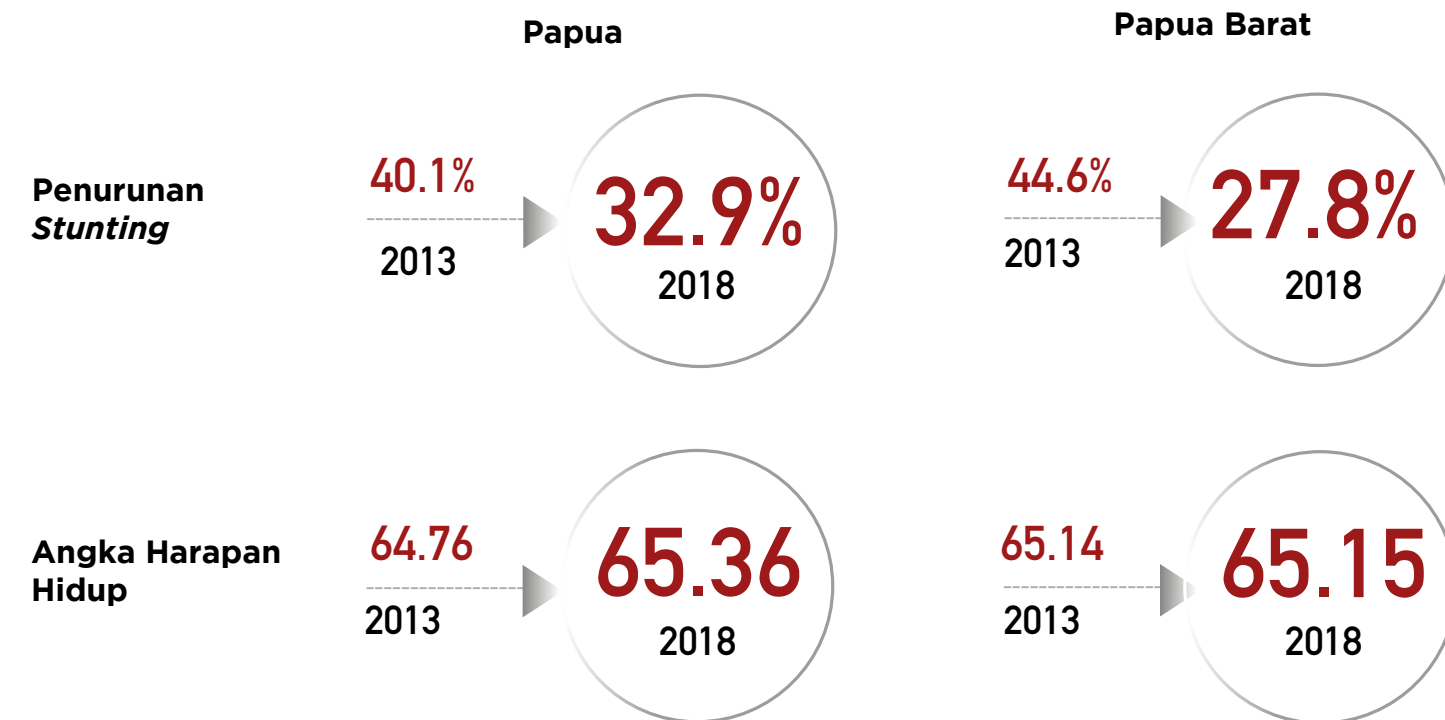
Data: BPS



Sejumlah anak sedang bermain kejar-kejaran di dermaga di daerah Abepantai, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Jayapura, Papua. (Foto: ANTARA FOTO/Anang Budiono)

Menuju Papua Sehat

Perhatian khusus pada kualitas kesehatan di Tanah Papua terbukti dengan turunnya angka *stunting* dan naiknya harapan hidup penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat.



Data: BPS

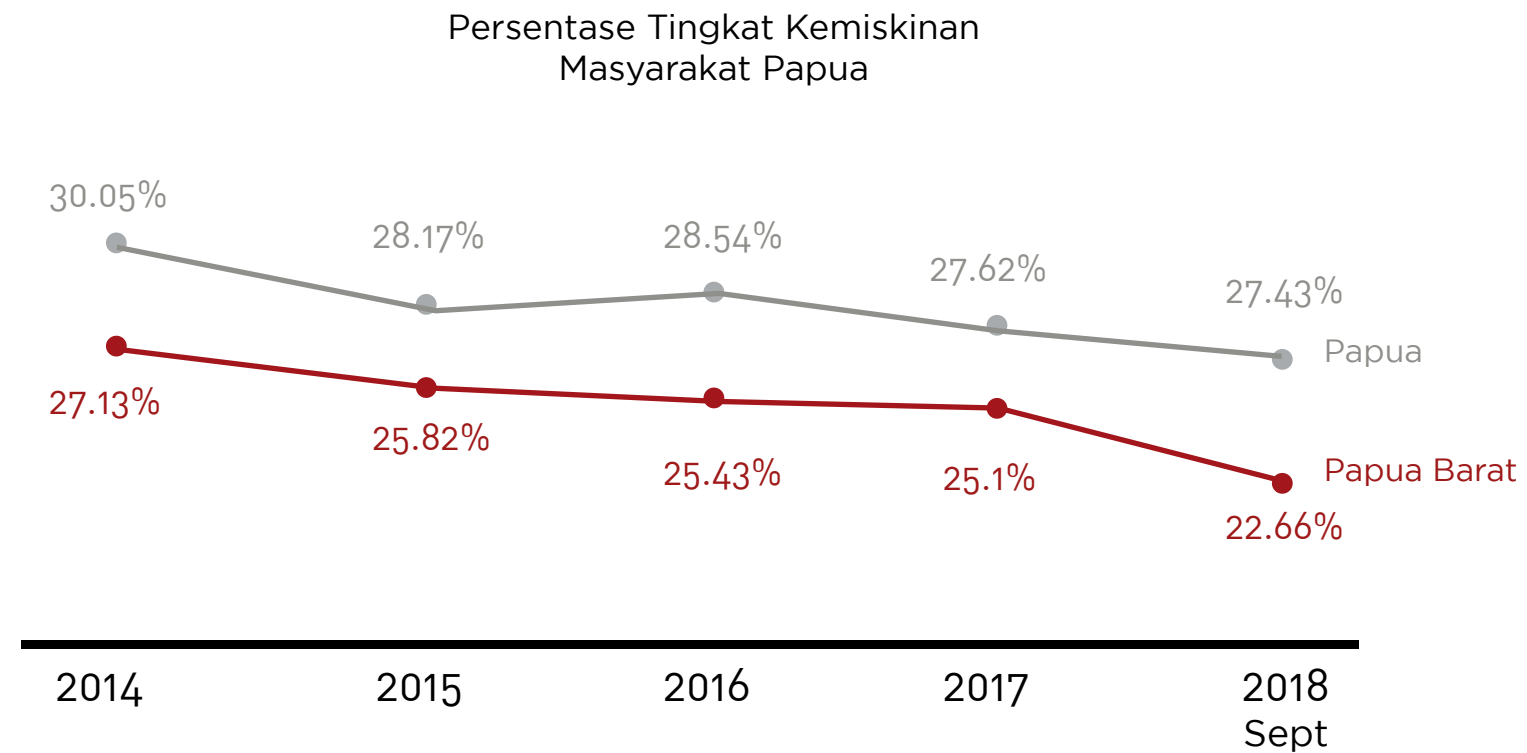


Peserta BPJS Kesehatan berobat ke dokter di Puskesmas Jaifuri Arso III, Keerom, Papua. (Foto: ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

PEMBANGUNAN TANAH PAPUA

Menurunkan Kemiskinan di Papua

Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui dukungan pemerintah pada produk ekonomi lokal telah berhasil meningkatkan ekonomi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.



Data: BPS



Penjual Noken Jeni Maday berpose dengan dagangannya di Pasar Mama-Mama Papua Sementara di Jayapura, Papua. (Foto: ANTARA FOTO / Wahyu Putro A)

Pembangunan Desa

Kemandirian desa, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh program pembangunan desa.



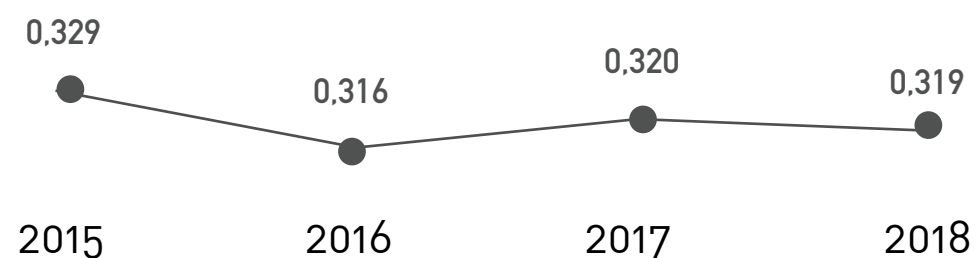
*Foto udara warga melintas di atas jembatan gantung yang dibangun Kementerian PUPR di Nagari Guguk Sarajo, IV Koto, Agam, Sumatera Barat
(Foto: ANTARA FOTO / Iggoy L Fitra)*

PEMBANGUNAN DESA

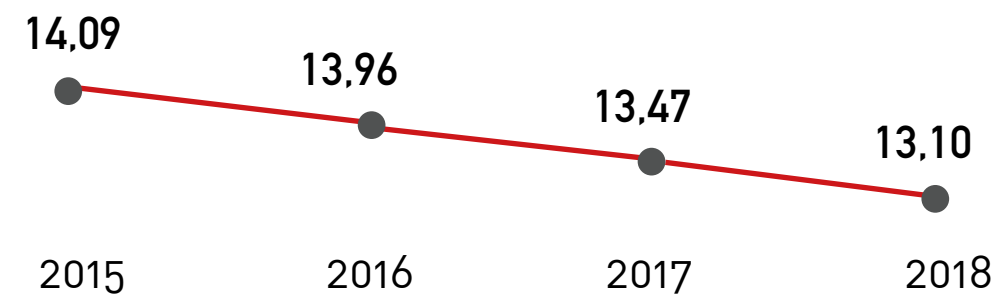
Kinerja Dana Desa

Transfer dana desa terus ditingkatkan mencapai Rp257 triliun pada tahun 2019 telah meningkatkan jumlah desa mandiri dan pendapatan masyarakat, sementara jumlah kemiskinan dan pengangguran di desa menurun.

Ketimpangan Desa



Penurunan Kemiskinan Desa



Data: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi



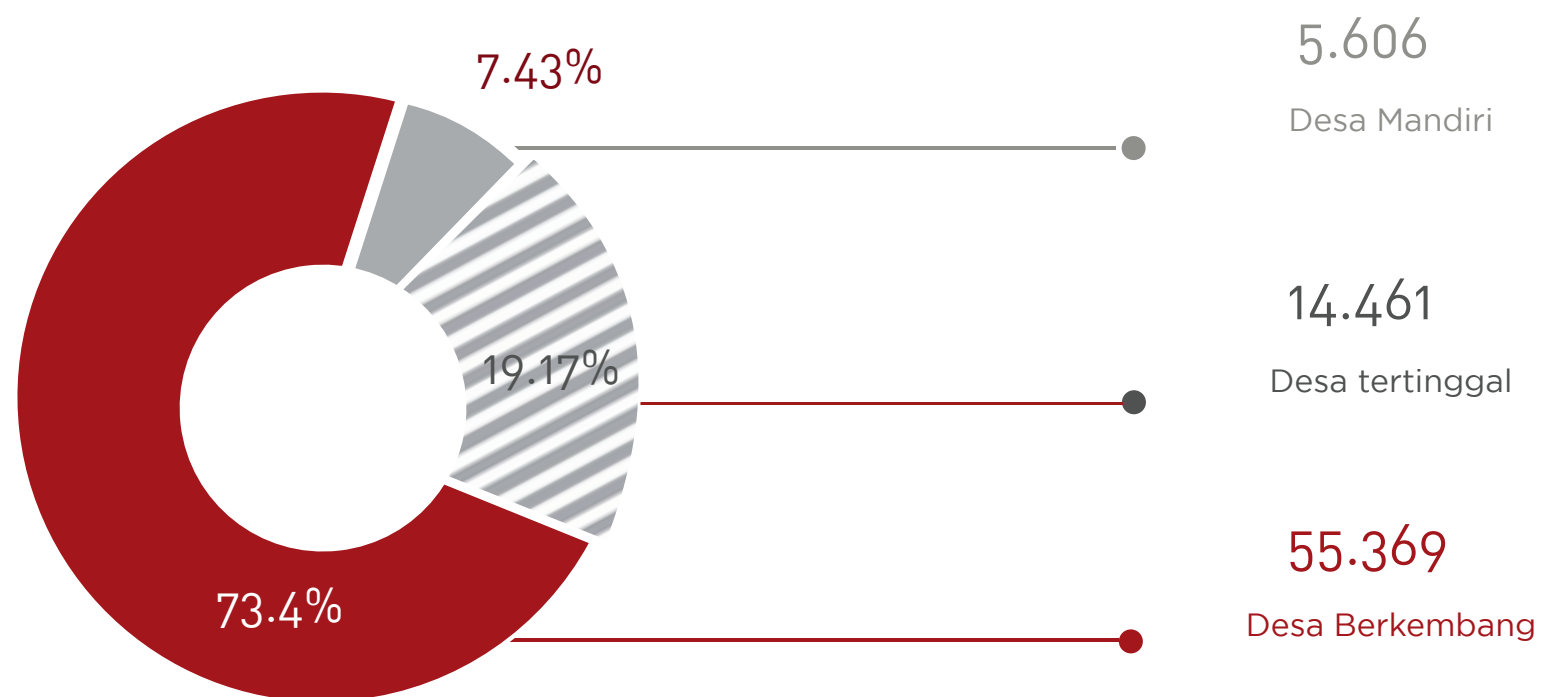
Sejumlah wisatawan berswafoto dengan latar belakang jembatan yang dicat warna-warni di Desa Wisata Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/ Aditya Pradana Putra)

PEMBANGUNAN DESA

Mewujudkan Desa Mandiri

Komitmen untuk membangun desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri serta berkurangnya jumlah desa tertinggal.

Jumlah desa menurut IPD 2018



Data: Kementerian Desa PDTT



Pengunjung berfoto di kawasan wisata Mandiri Sayang Kaak yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hangjuang di Desa Handap Heurang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/ Adeng Bustom)

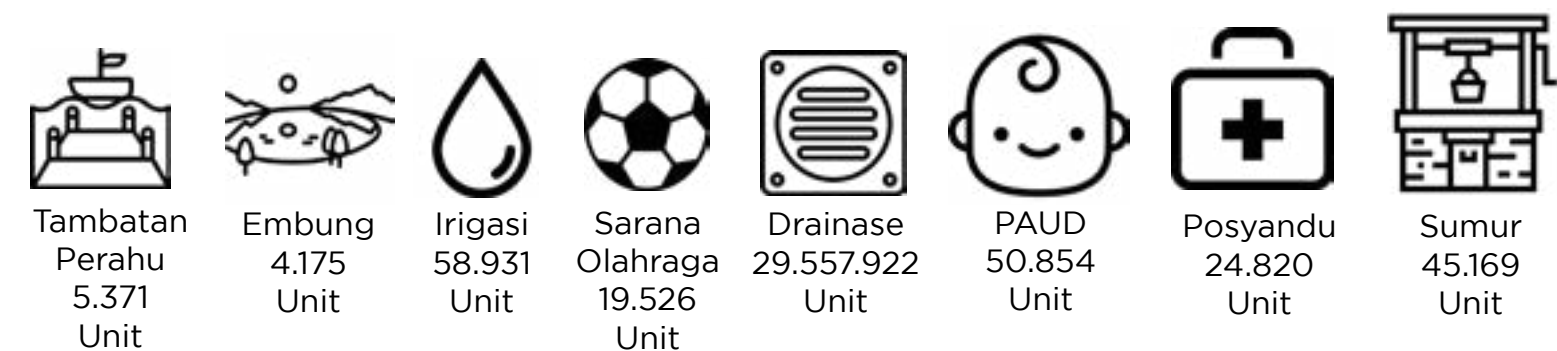
PEMBANGUNAN DESA

Penggunaan Dana Desa yang Tepat

Dana desa telah menghasilkan infrastruktur desa, menghidupkan BUM Desa, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa.



Warga berkendara di jalan yang dibangun menggunakan dana desa di Desa Laladon, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/ Yulius Satria Wijaya)



Data: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

4.
Memperkuat Kehadiran
Negara dalam Melakukan
Reformasi Sistem dan
Penegakan Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat,
dan Tepercaya



*Anak-anak membawa bendera merah putih
di desa pesisir pulau Ndao, Rote, Nusa Tenggara Timur
(Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)*

Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pemerintah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kualitas penegakan hukum yang berkeadilan, baik melalui penguatan budaya hukum, perlindungan hak asasi manusia maupun reformasi kelembagaan



*Terdakwa Hakim PN Jakarta Selatan nonaktif Iswahyu Widodo (kiri) dan Irwan (kedua kiri) mengikuti sidang pembacaan putusan (vonis) di Pengadilan Tipikor, Jakarta
(Foto: ANTARA FOTO/ Dhemas Reviyanto)*

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Menguatkan Posisi Indonesia sebagai Negara Hukum

Indonesia terus mengukuhkan diri sebagai negara hukum di antaranya dengan pemberantasan pungutan liar dan pembangunan pengadilan-pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air.

Pemberantasan pungutan liar melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)



20,953 Kasus Operasi Tangkap Tangan

32,223 Orang Tersangka

Rp 323.143.524.171

Barang bukti yang berhasil diselamatkan

Data: Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan



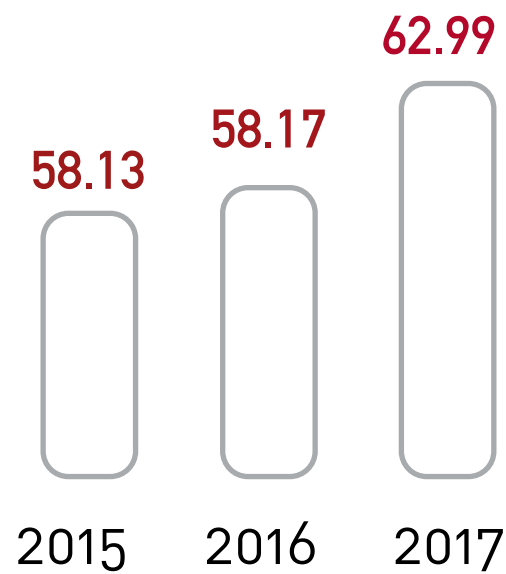
*Majelis hakim menggelar sidang pidana pembakar hutan dengan terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa di Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir, Riau
(Foto: ANTARA FOTO/ Aswaddy Hamid)*

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

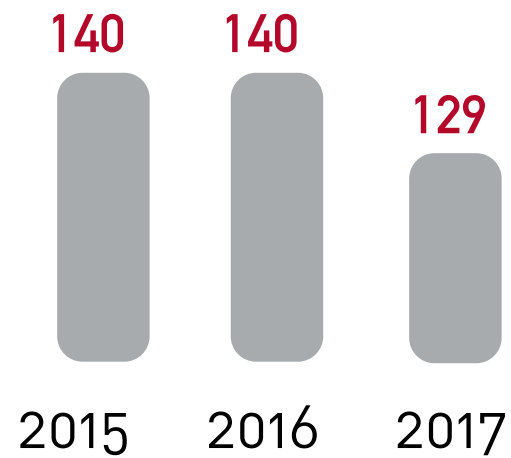
Hukum yang Melayani Masyarakat

Perlindungan hukum untuk masyarakat terus ditingkatkan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase tingkat penyelesaian kasus tindak pidana dan menurunnya risiko penduduk terkena kejahatan.

Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (%)



Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (orang/seratus ribu penduduk)



Data: BPS dan Bappenas



Lima orang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor dan barang bukti saat gelar perkara di Mapolres Cimahi, Jawa Barat (Foto: TEMPO/Aditya Herlambang Putra)

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Komitmen dalam Menjunjung HAM

Kinerja Pemerintah di bidang hak asasi manusia mendapatkan apresiasi Dewan HAM PBB saat Indonesia menyampaikan laporan kelompok kerja *Universal Periodic Review* tahun 2017.



Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Dubes Indonesia untuk Swiss, saat menghadiri sidang Universal Periodic Review pada di Jenewa, Swiss, pada tahun 2017. (Foto: Kementerian Luar Negeri)

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Melawan Narkoba

Pemberantasan narkoba terus digalakkan dengan berbagai program untuk menimbulkan efek jera. Penyitaan hasil tindak pidana pencucian uang tersangka tindak pidana narkoba dan pemberantasan jaringan sindikat merupakan program penting yang terus dilaksanakan.

675 M

Jumlah aset yang disita dari hasil tindak pidana pencucian uang tersangka tindak pidana narkoba sejak 2015

141

Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap sejak 2015

Data: Badan Narkotika Nasional (BNN)



PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Perlindungan HAM Perempuan dan Anak

Hak-hak perempuan dan anak makin terlindungi dengan disahkannya Revisi UU Perkawinan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di 17 Provinsi.



Kapasitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan & anak meningkat dengan berdirinya UPTD PPPA di 20 provinsi & 36 kabupaten/kota.



Revisi UU No 1/74 tentang Perkawinan disetujui oleh Pemerintah dan DPR guna mencegah praktik perkawinan anak.

Data: Kementerian PPPA



Anak-anak bermain dengan gembira, berkat berbagai program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ibu dan anak (Foto: Kementerian ESDM)

EKONOMI

Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis merupakan prioritas bidang ekonomi.



Rangkaian kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus-Bundaran HI melintas di Stasiun Fatmawati, Jakarta, (Foto: ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga)

Pengelolaan Ekonomi Makro

Lepas dari apapun visi yang diemban, pengelolaan ekonomi makro, terutama pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran selalu menjadi indikator penting untuk menilai pencapaian sebuah pemerintahan.



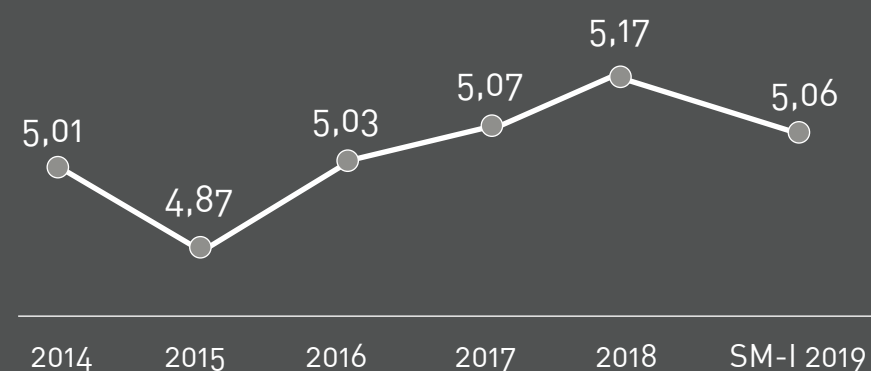
*Gemerlap lampu gedung dan kendaraan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta
(Foto: TEMPO/ Nurdiansah)*

PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

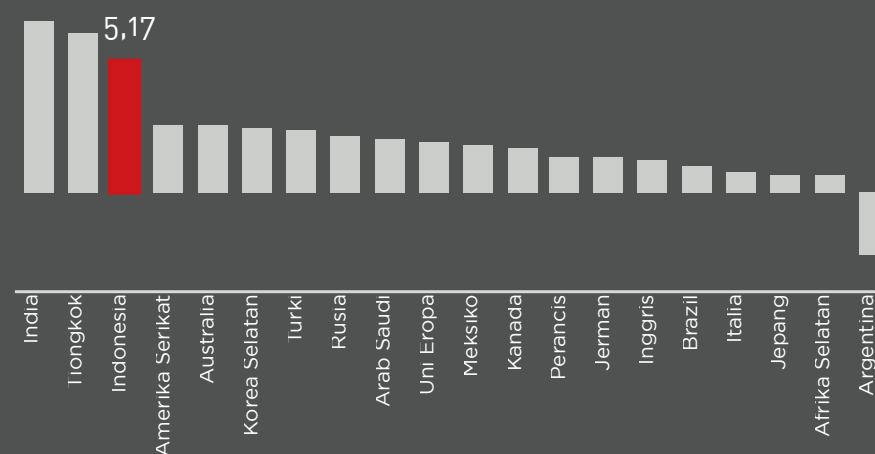
Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Ekonomi Indonesia tumbuh stabil pada level 5% di tengah ketidakpastian global. Menjadi salah satu yang terbaik di antara negara G20. Pertumbuhan ini berkualitas dengan diikuti penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan Ekonomi (%)



Pertumbuhan Ekonomi Negara G20 Tahun 2018 (%)



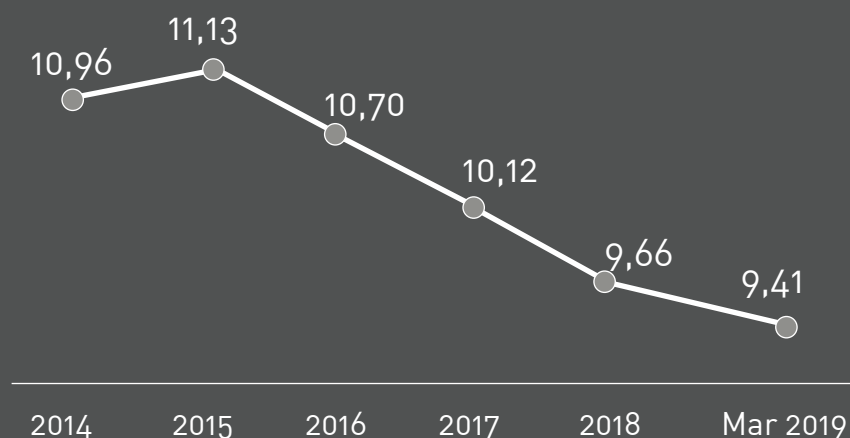
Data: BPS dan Bank Dunia

PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

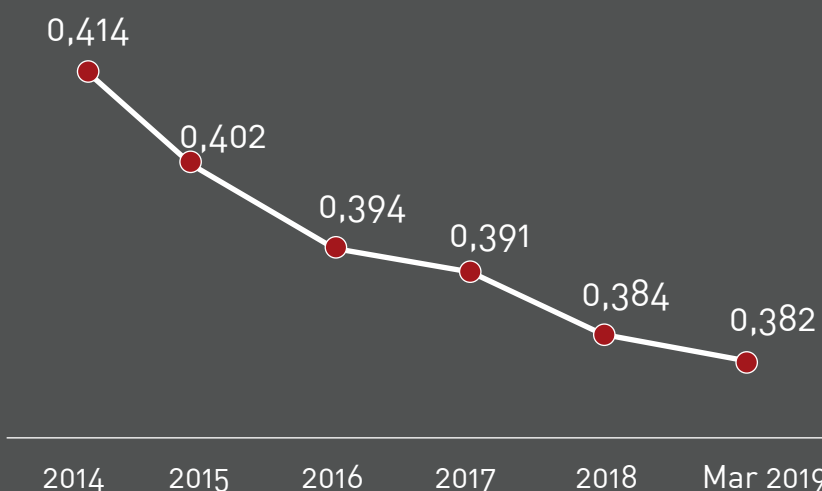
Ketimpangan Pendapatan & Kemiskinan Menurun

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka kemiskinan mencapai level satu digit. Dibarengi dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus menurun.

Persentase Penduduk Miskin (%)



Rasio Gini

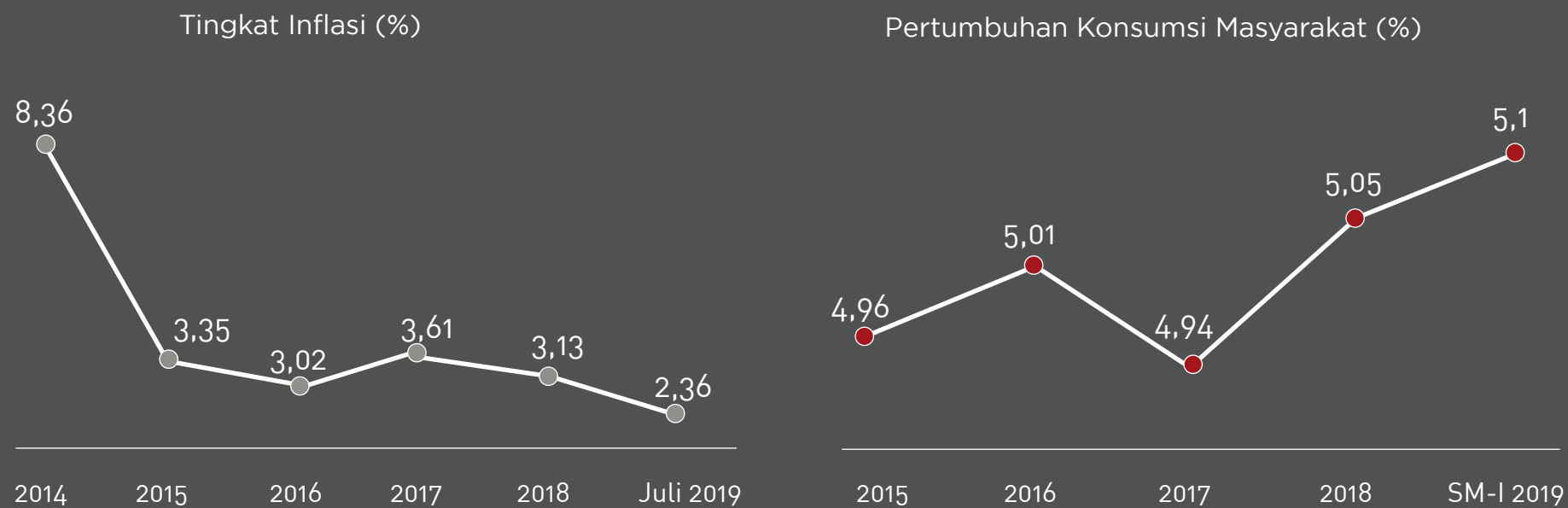


Data: BPS

PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

Harga-harga Terkendali & Daya Beli Masyarakat Terjaga

Inflasi rendah pada level 3%, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan terus tumbuh. Merupakan angka rata-rata inflasi yang terendah dalam satu periode pemerintahan sejak era reformasi.



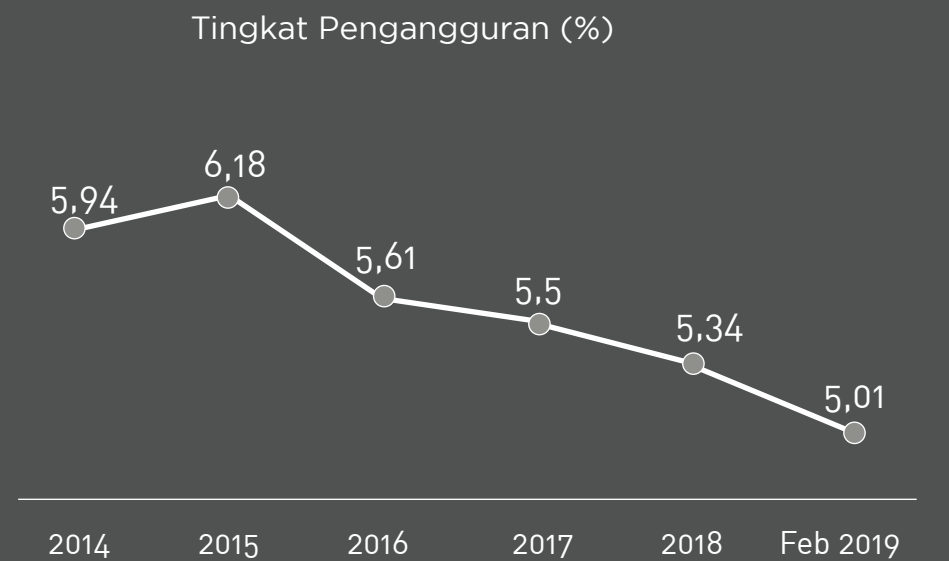
Data: BPS

PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

Penciptaan Lapangan Kerja & Penurunan Pengangguran

11,21 juta lapangan kerja tercipta selama 2015 - 2019, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Angka pengangguran terus menurun, terendah sejak 20 tahun terakhir.

11,21 juta
Lapangan Pekerjaan



Data: BPS

PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

Realokasi Subsidi Energi untuk Belanja yang Lebih Produktif

Sejak 2015 alokasi subsidi energi dikurangi, dialihkan untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Subsidi tepat sasaran mendorong produktivitas dan pemerataan ekonomi.

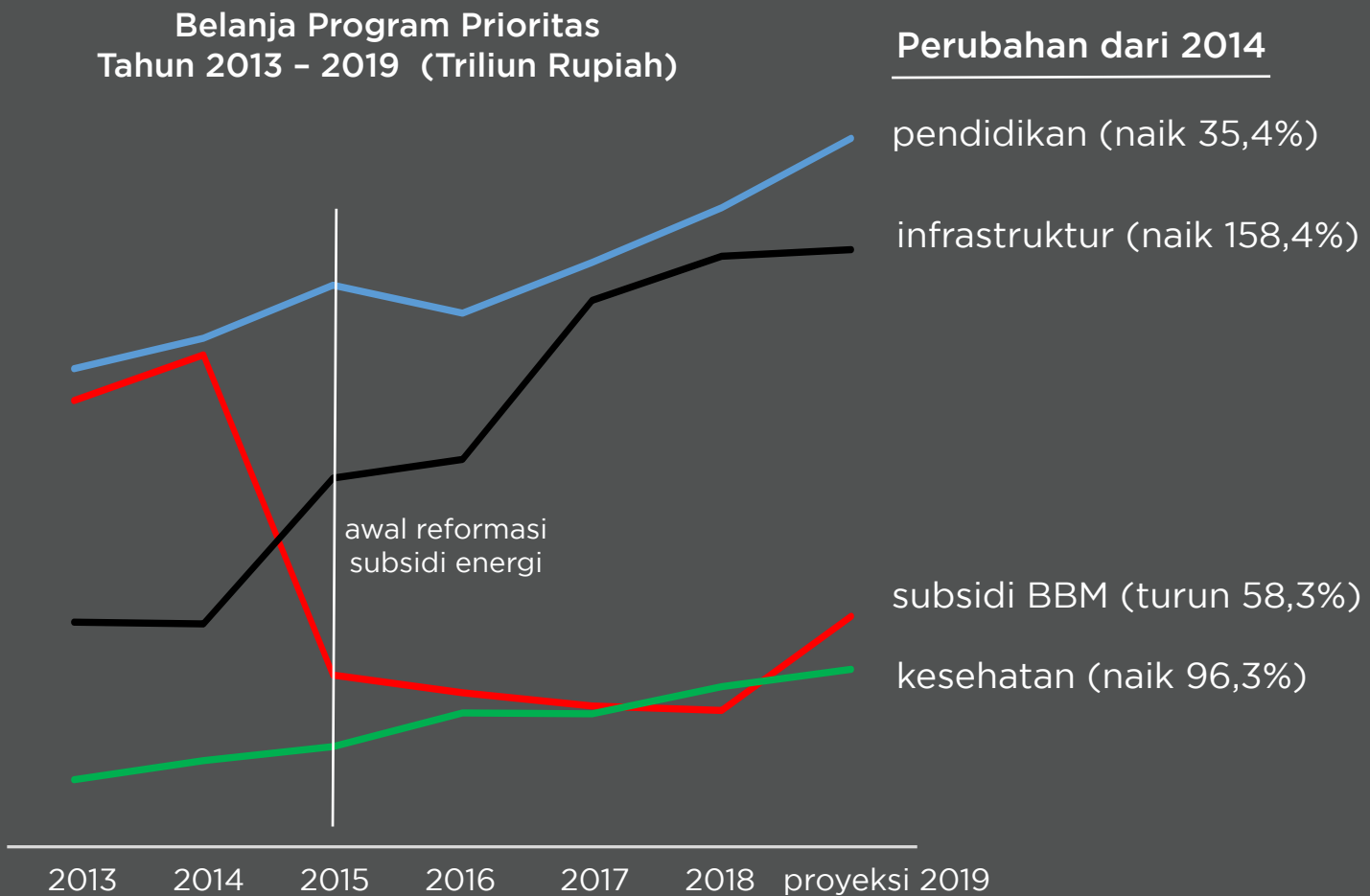


Foto udara pembangunan Simpang Susun Krapyak di titik pertemuan proyek Tol Semarang-Batang dan Tol Dalam Kota Semarang, Jawa Tengah (Foto: ANTARA FOTO/ Aditya Pradana)

Program Utama	
Pendidikan	KIP, PKH, Bidik Misi dan DPPN, tunjangan profesi guru, rehab sekolah.
Infrastruktur	Pembangunan dan preservasi jalan, jalur KA, informasi dan telekomunikasi, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Subsidi BBM	Subsidi lebih tepat sasaran baik BBM, LPG, dan listrik.
Kesehatan	Distribusi faskes, imunisasi, program untuk ibu hamil dan menyusui, JKN, pencegahan <i>stunting</i> .

Data: Kementerian Keuangan

PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

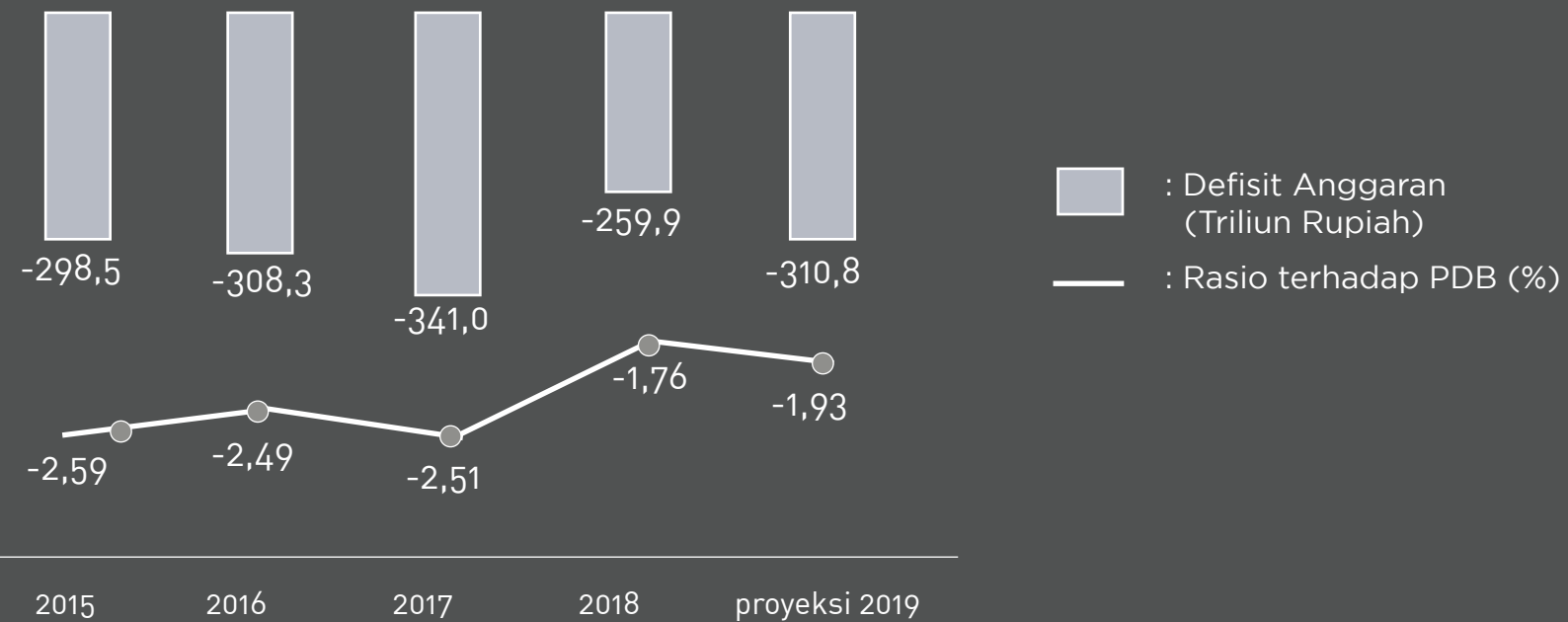
Defisit Menurun, Anggaran Mandiri

Rasio defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer terhadap PDB terus membaik. APBN semakin mandiri, lebih mengandalkan sumber pendapatan dalam negeri.

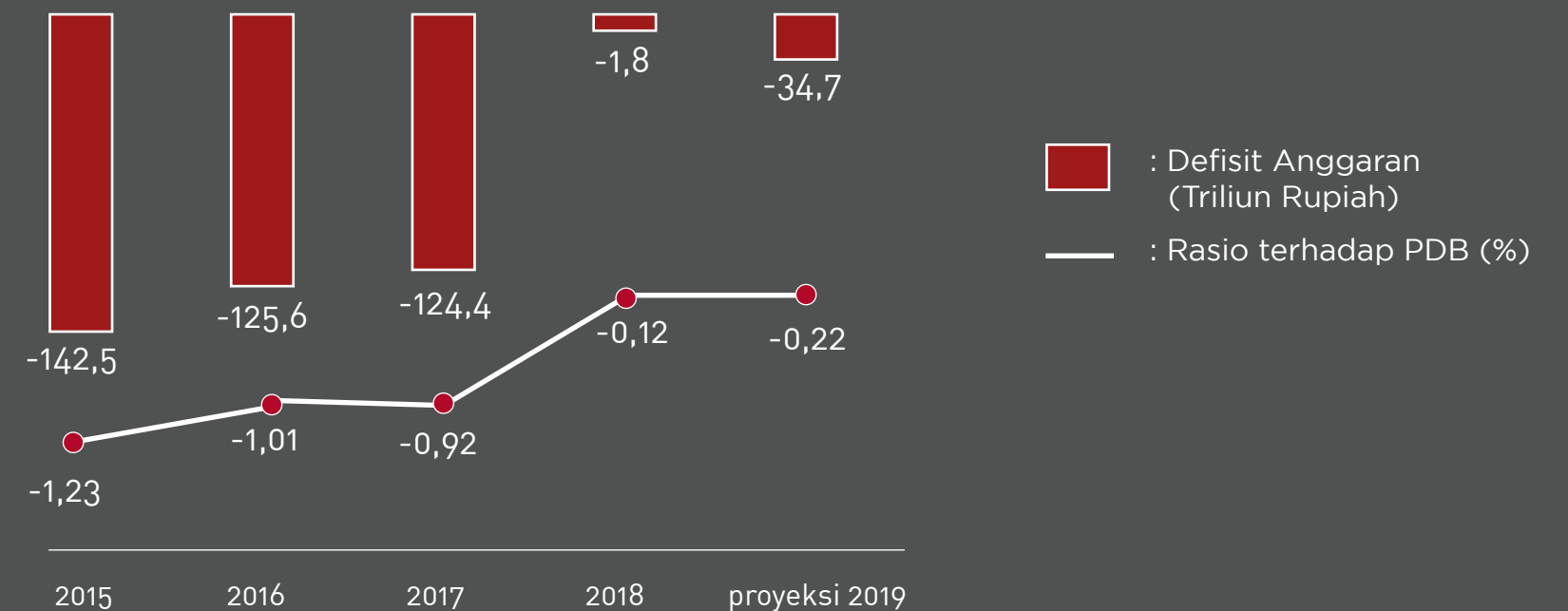


Petugas melayani pelaporan SPT Tahunan PPh dengan sistem online (E-Filing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, Jawa Timur.
(Foto: ANTARA FOTO/ Irfan Anshor)

Defisit Anggaran 2015-2019



Defisit Keseimbangan Primer 2015-2019



PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

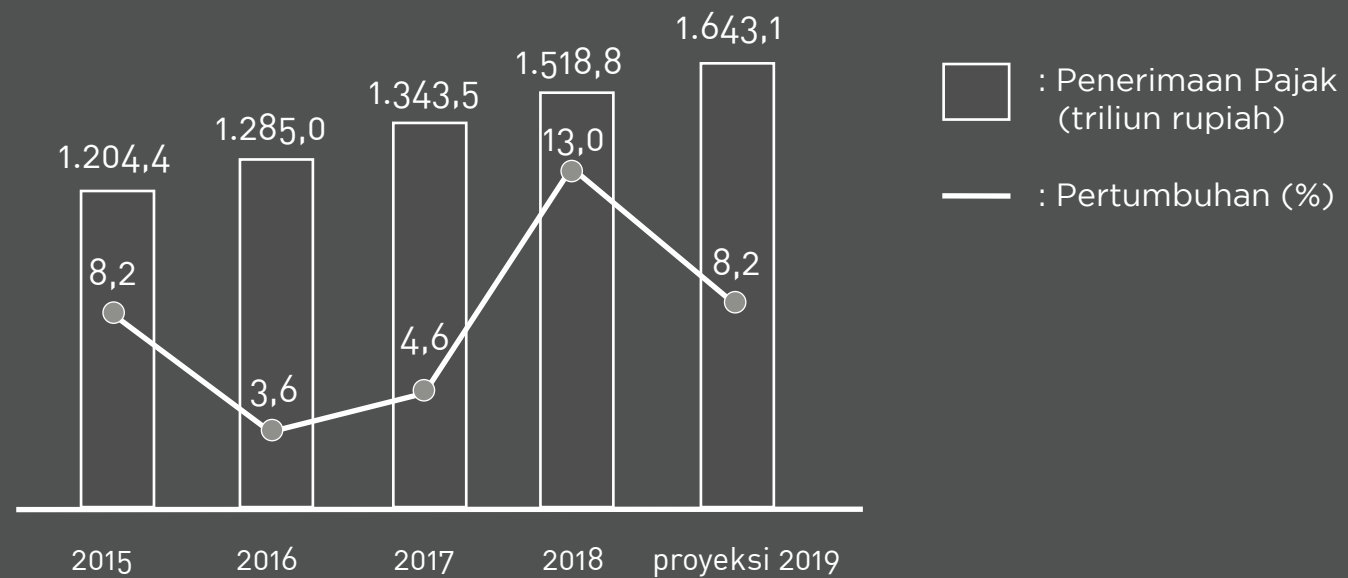
Penerimaan Pajak & Komitmen Membangun Daerah

Penerimaan pajak terus meningkat sejalan dengan perbaikan sistem perpajakan. Hal ini mendorong komitmen pemerintah membangun daerah melalui peningkatan Transfer Ke Daerah & Dana Desa.

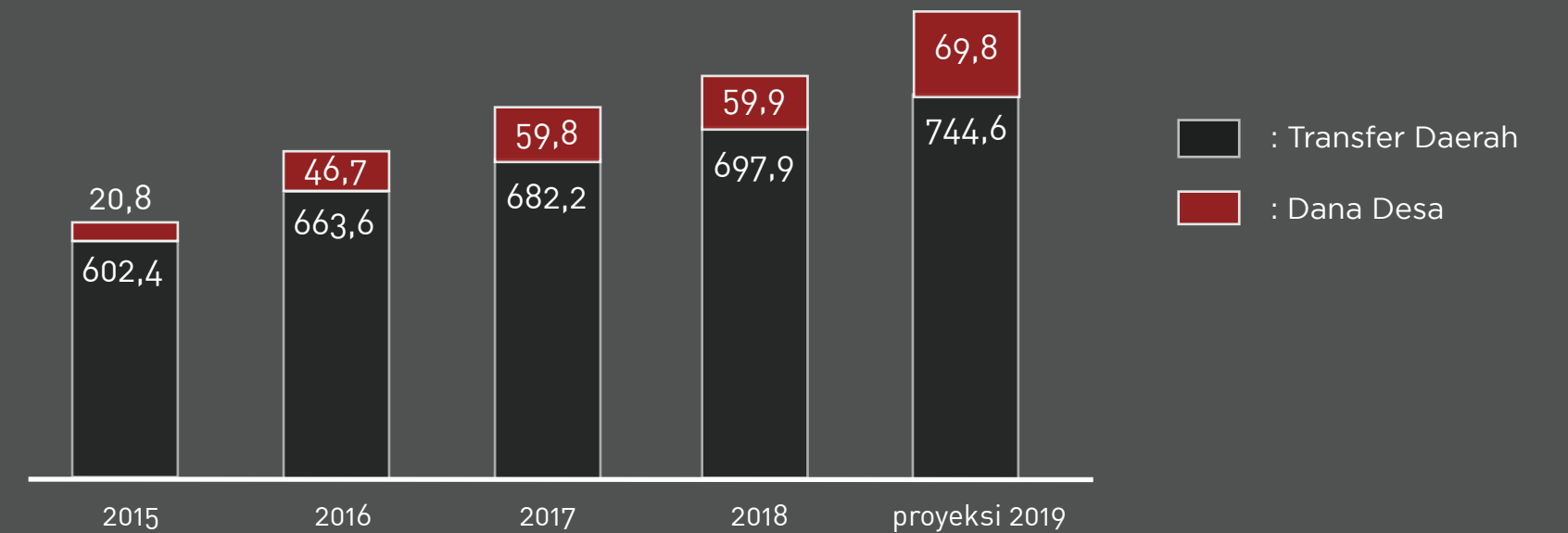


Sejumlah wisatawan berswafoto dengan latar belakang jembatan yang dicat warna-warni di Desa Wisata Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/ Aditya Pradana Putra)

Penerimaan Pajak (Triliun Rp)



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (triliun rupiah)

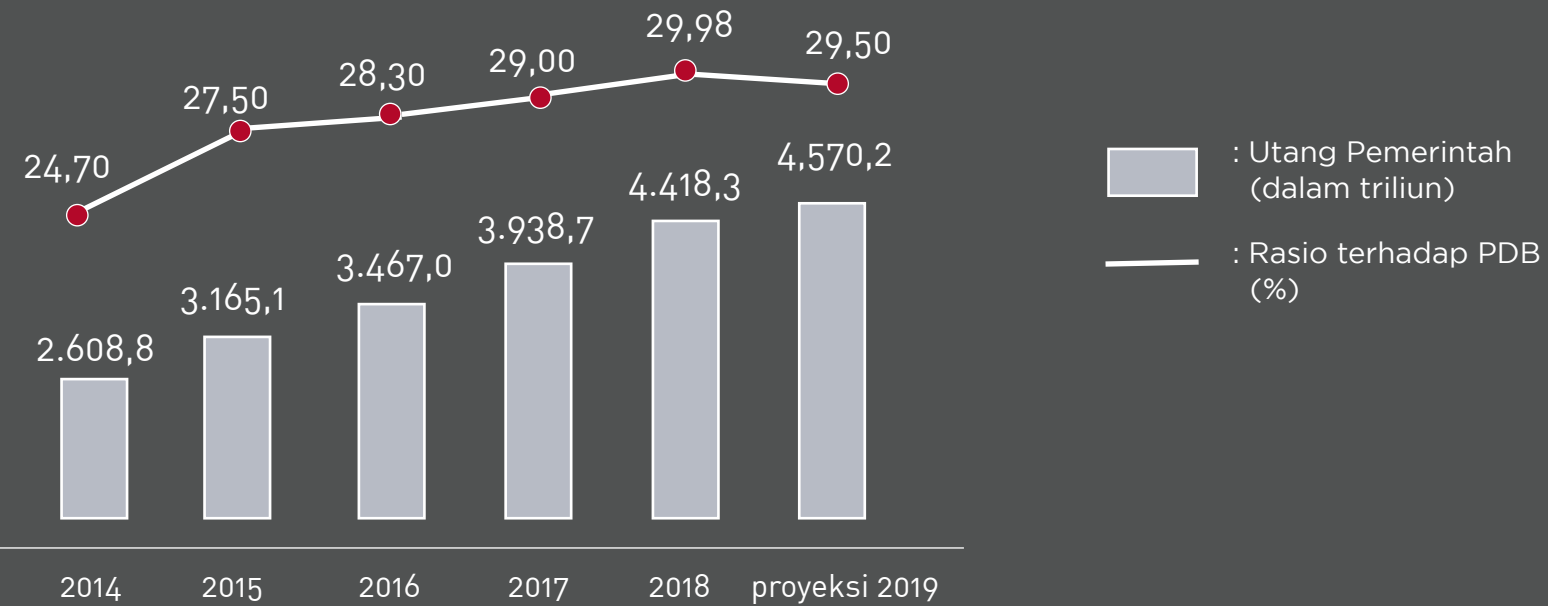


PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

Utang Pemerintah Aman & Dikelola dengan Hati-hati

Utang pemerintah dikelola untuk mendukung peningkatan belanja produktif. Rasio utang terhadap PDB aman, jauh di bawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara maksimal sebesar 60% PDB.

Utang Pemerintah dan Rasio terhadap PDB



Data: Kementerian Keuangan

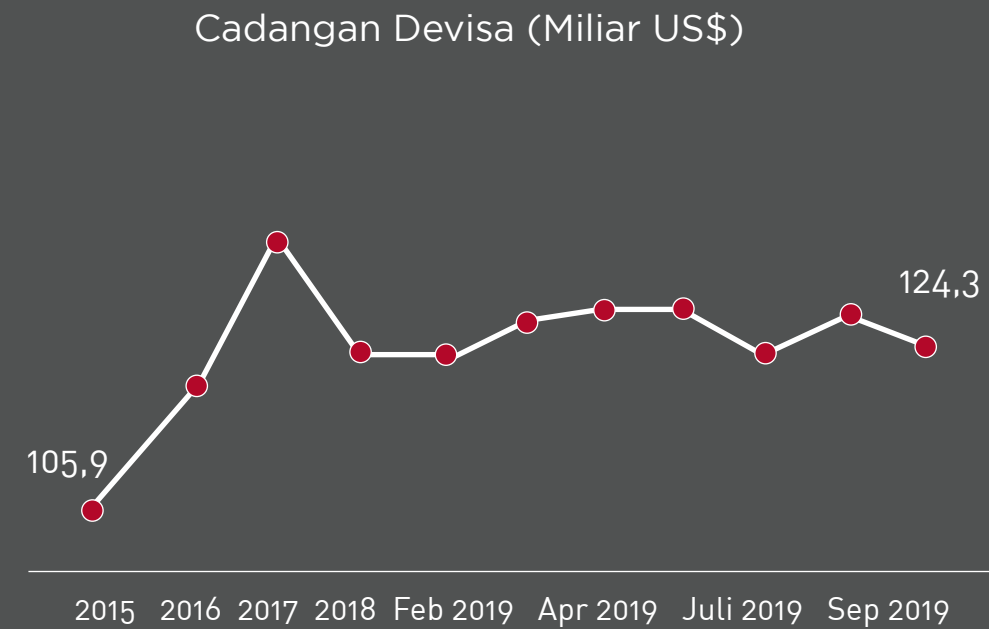


Jalan Tol Trans Jawa yang kini telah tersambung dari Merak di Banten sampai Banyuwangi di Jawa Timur sepanjang 1.150 kilometer (Foto: Youtube Presiden Joko Widodo)

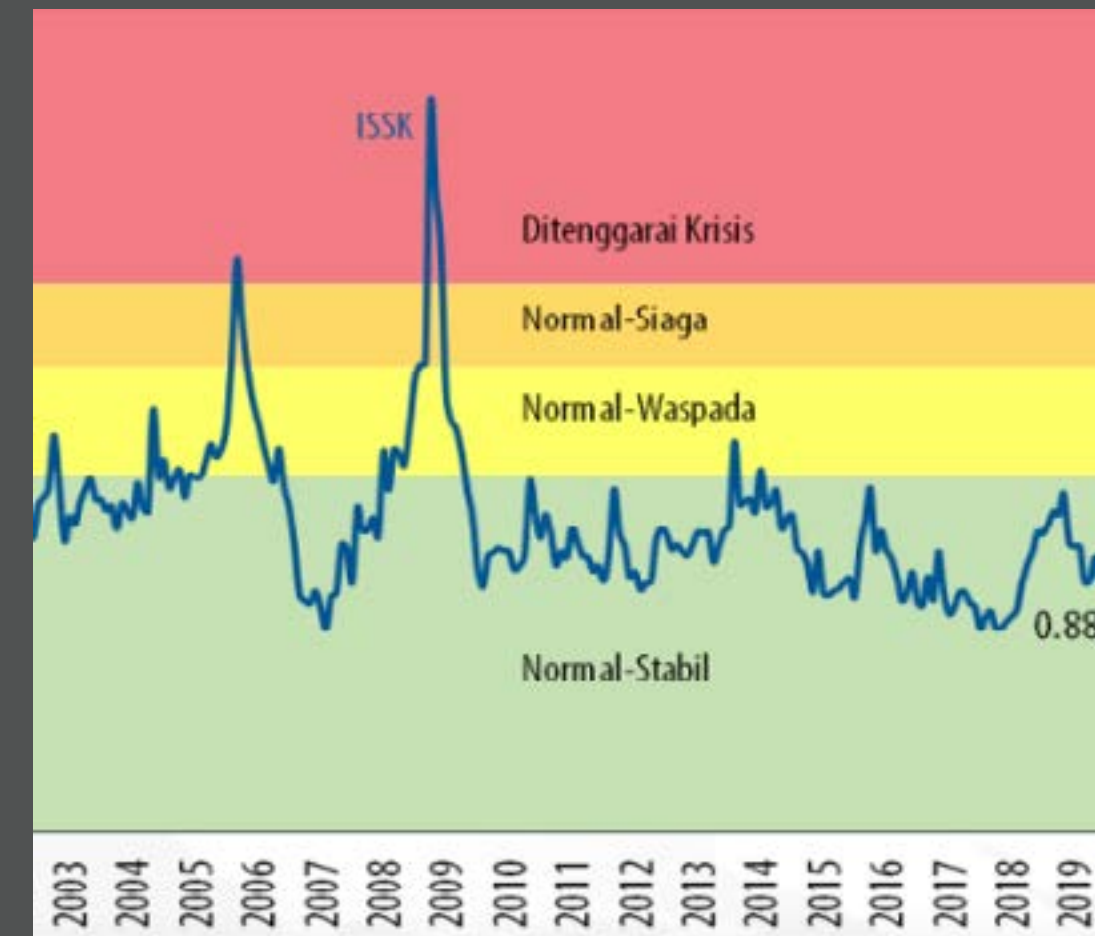
PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO

Sektor Moneter & Keuangan Terkendali

Cadangan devisa Indonesia tinggi dan aman, setara dengan pembiayaan 7,1 bulan impor. Di atas standar kecukupan internasional (3 bulan impor). Di sisi keuangan, stabilitas terjaga, sejak 2015 ISSK selalu dalam posisi normal-stabil.



Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)



5.
Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia
dan Masyarakat Indonesia



Anak-anak dengan bendera merah putih di kopiahnya saat peringatan Hari Santri Nasional di halaman Balai Kota Semarang (Foto: TEMPO/Budi Purwanto)

Mewujudkan Indonesia Sentris

Menggeser orientasi pembangunan di daerah yang dengan skala ekonomi besar dan penduduk padat ke daerah pinggiran dengan skala ekonomi kecil, akses yang susah, serta penduduk yang jarang adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



*Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua
(Foto: Youtube Presiden Joko Widodo)*

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

Menuju Indonesia Terang

Setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan terang di malam hari. Untuk mewujudkannya, 35 ribu MW pembangkit disiapkan, ratusan kilometer kabel transmisi kabel disambungkan dan untuk masyarakat di pedalaman, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi dihadirkan.

98,9%

Rasio Elektrifikasi hingga Semester I 2019

Data: Kementerian ESDM



Penerima Bantuan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Nusa Tenggara Timur (Foto: Kementerian ESDM)

Pemasangan Program Listrik Masuk Desa di Desa Galang, Kepulauan Riau (Foto: Kementerian ESDM)





Penerima Bantuan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Kab. Lanny Jaya Prov. Papua (Foto: Kementerian ESDM)



Penerima Bantuan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Kab. Lanny Jaya Prov. Papua (Foto: Kementerian ESDM)

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

BBM Satu Harga

Tidak ada yang terlalu mahal untuk keadilan sosial. Energi yang terjangkau akan meningkatkan produktivitas rakyat dalam berbagai bidang.

CAPAIAN BBM SATU HARGA

170 titik

penyaluran
BBM Satu Harga

Data: Kementerian ESDM



*Pengantaran BBM ke wilayah Panai,
Kab. Obana, Papua Barat
(Foto: Pertamina)*

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

Palapa Ring Mempersatukan Indonesia

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak pemerataan dan peningkatan produktivitas. Dengan alasan itu, Pemerintah terus meningkatkan prestasi internet secara merata ke seluruh wilayah.



Data: Kementerian Komunikasi dan Informatika



Pemasangan Base Transceiver Station (BTS) di NTT
(Foto: Kementerian Kominfo)

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

Membuka Keterisolasian

Melalui program Jembatan Udara, pemerintah menyediakan rute penerbangan yang melayani hingga ke pedalaman, daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar untuk meningkatkan konektivitas logistik, serta memangkas kesenjangan ekonomi dan kesenjangan antar-wilayah.

39rute

penerbangan program jembatan udara

Data: Kementerian Perhubungan



*Bandara Miangas, Sulawesi Utara.
(Foto: Kementerian Perhubungan)*



*Bandara Internasional Juwata, Tarakan.
(Foto: Kementerian Perhubungan)*

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

Menciptakan dan Menghubungkan Pusat-pusat Ekonomi

Kehadiran infrastruktur begitu penting dalam perekonomian. Dengan terjadinya kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa, infrastruktur yang baik pun mendorong bertumbuhnya pusat-pusat ekonomi di sekitarnya.

*Foto udara Jembatan Kali Kuto yang telah selesai dibangun di ruas Tol Semarang-Batang, Sambungsari, Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
(Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)*

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

Untuk Kemakmuran Rakyat

Kita dapat belajar dan bekerja sama dengan siapapun. Namun kendali atas kekayaan alam harus dikembalikan pada Ibu Pertiwi, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

51%

divestasi saham *Freeport*
untuk Indonesia

Data: Kementerian ESDM



Penandatanganan nota pendahuluan perjanjian oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi Gunadi (ketiga kanan) dan Presiden Direktur Freeport McMoran (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

Pembangunan Indonesia-Sentris

Demi keadilan ekonomi dan kemajuan bersama pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri.

CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

3.194km
Jalan Perbatasan

1.387km
Jalan Tol

811,89km
Rel Kereta Api

136
Pelabuhan

15
Bandara

65
Bendungan

Data: Kementerian PUPR, KPPIP



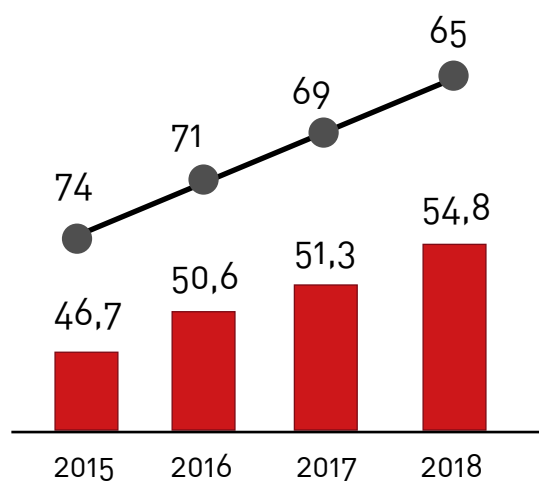
Foto udara suasana Car Free Day (CFD) di Kuta Beach Park The Mandalika, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB. (Foto: ANTARA FOTO/ Ahmad Subadi)

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

Ketahanan Pangan Meningkat, Kesejahteraan Petani Membaik

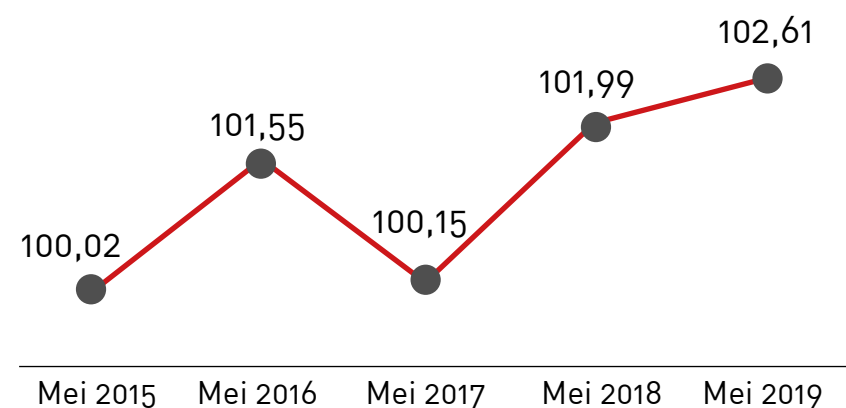
Ketahanan pangan Indonesia terus membaik sejalan dengan perbaikan nilai tukar petani (NTP). Didukung oleh perbaikan tata kelola pertanian di hulu, data statistik pangan dan infrastruktur pangan.

Global Food Security Index (GFSI)



■ : Indeks GFSI
 — : Peringkat GFSI

Nilai Tukar Petani (NTP)



Data: BPS



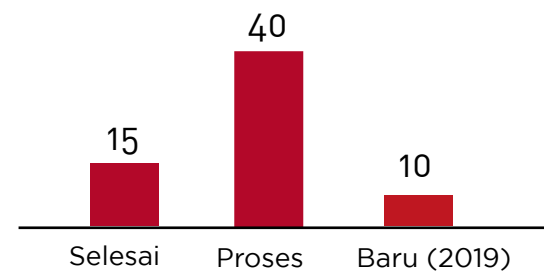
Sejumlah petani menanam padi di Hutan Desa (Hutan Nagari) Jorong Simancuang, Sumatera Selatan (Foto: Dok. Kementerian LHK)

MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS

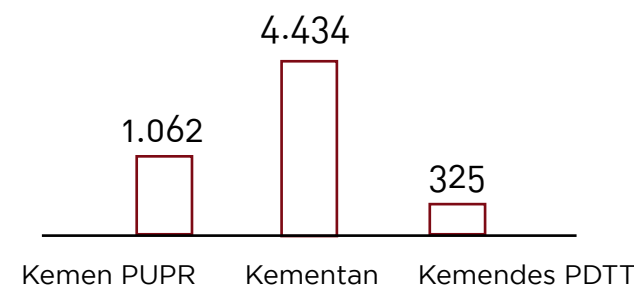
Pembangunan Infrastruktur Pangan

Pembangunan infrastruktur pangan adalah komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jaringan irigasi dan ketersediaan air adalah kunci utamanya.

Pembangunan Bendungan 2015-2019 (unit)



Pembangunan Embung 2015-2019 (unit)



Jaringan Irigasi (Ha)

Pembangunan Baru (Kemen PUPR)	1,00 juta
Rehabilitasi (Kemen PUPR)	3,02 juta
Rehabilitasi Irigasi Tersier (Kemen Pertanian)	3,21 juta

Data: Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT.



Sejumlah petugas membersihkan sampah di pinggir Bendungan Rotiklot yang sudah selesai dibangun di Kabupaten Belu, NTT (Foto: ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

6.
Meningkatkan Produktivitas
Rakyat dan Daya Saing di
Pasar Internasional Sehingga
Indonesia Maju dan Bangkit
Bersama Bangsa Asia Lainnya



*Penjual sayuran Urbana Pekei menata dagangan
di Pasar Mama-Mama Papua Sementara di Jayapura, Papua
(Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)*

Produktivitas dan Daya Saing

Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh peningkatan produktivitas di segala bidang. Untuk itu diperlukan daya saing yang tinggi terutama dari sisi kemudahan perizinan maupun sumber daya manusia yang kompetitif.



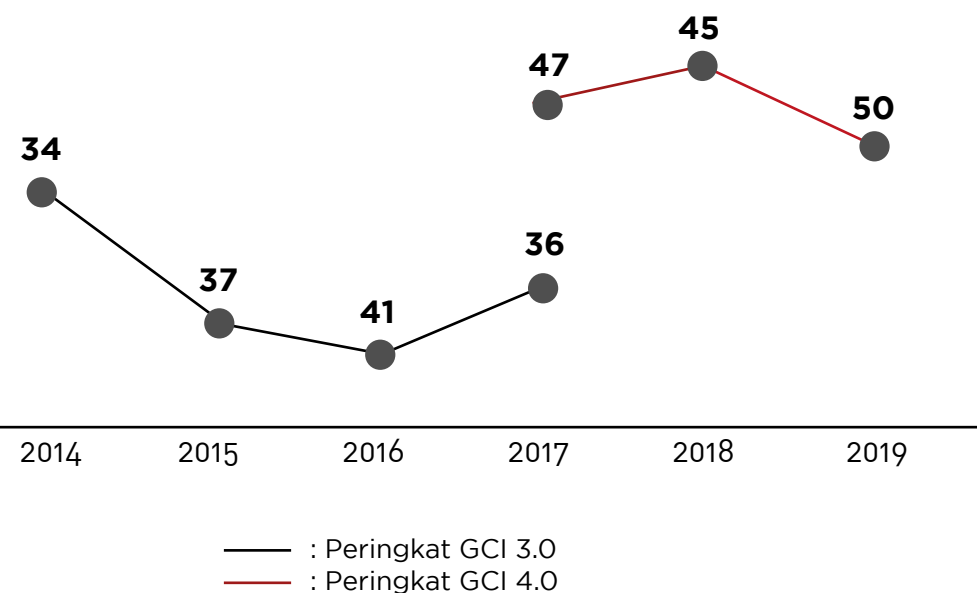
*Sejumlah pekerja PT INKA saat mengecek gerbong kereta buatan Indonesia yang akan diekspor ke berbagai negara
(Foto: Youtube Presiden Joko Widodo)*

PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

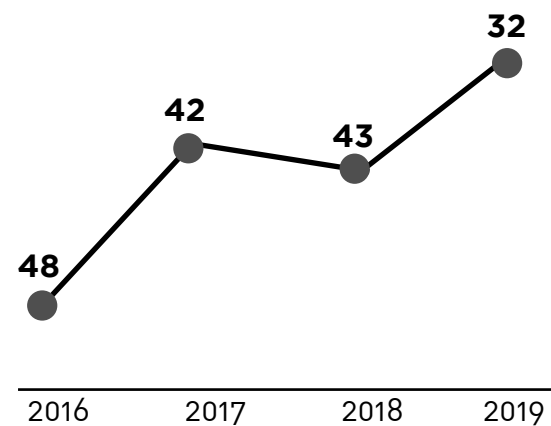
Daya Saing Nasional Membaik

Peringkat daya saing global (GCI) Indonesia turun dari posisi 45 (2018) ke 50 (2019), karena turunnya skor dari 64,9 (2018) menjadi 64,6 (2019). Salah satu penyebabnya adalah masalah kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Meski demikian, kemampuan Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi daya saing dunia usaha (*enterprises*) terus meningkat, ditunjukkan oleh naiknya peringkat daya saing IMD.

Peringkat Daya Saing Global



IMD World Competitiveness Ranking



Data: WEF dan IMD



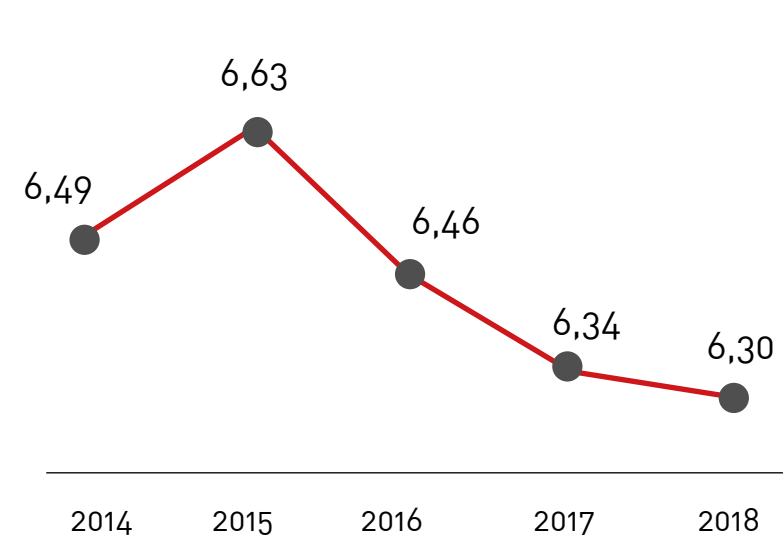
Kelembagaan moda raya terpadu/mass rapid transit (MRT) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI melintas di kawasan Fatmawati (Foto: TEMPO/Tony Hartawan)

PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

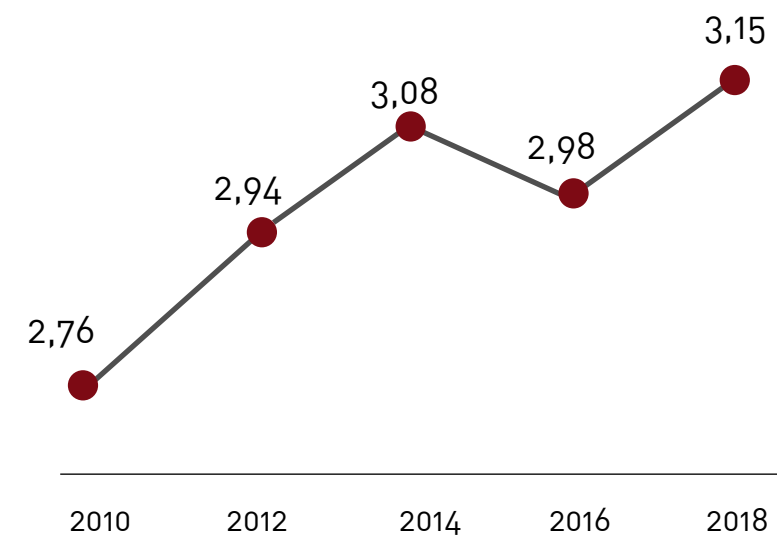
Efisiensi Nasional Meningkat

Kualitas dan efisiensi investasi Indonesia terus membaik, dibarengi kinerja logistik nasional yang terus meningkat. Menjadi fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)



Logistic Performance Index (LPI)



Data: BPS dan Bank Dunia



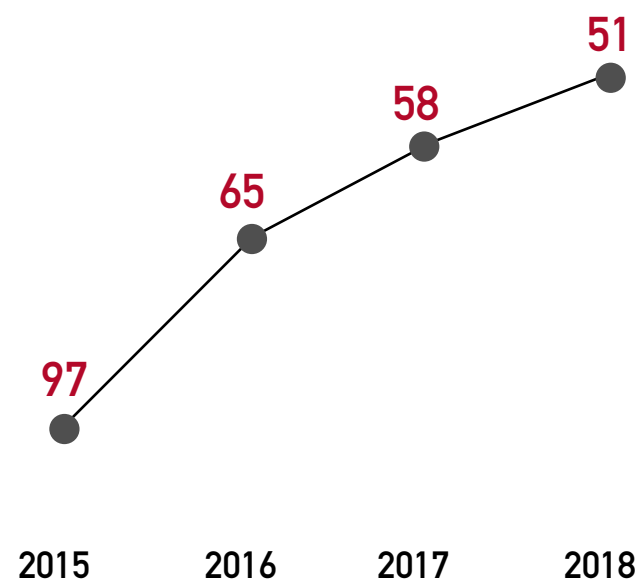
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (Foto: ANTARA FOTO/ Indrianto Eko Suwarso)

PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

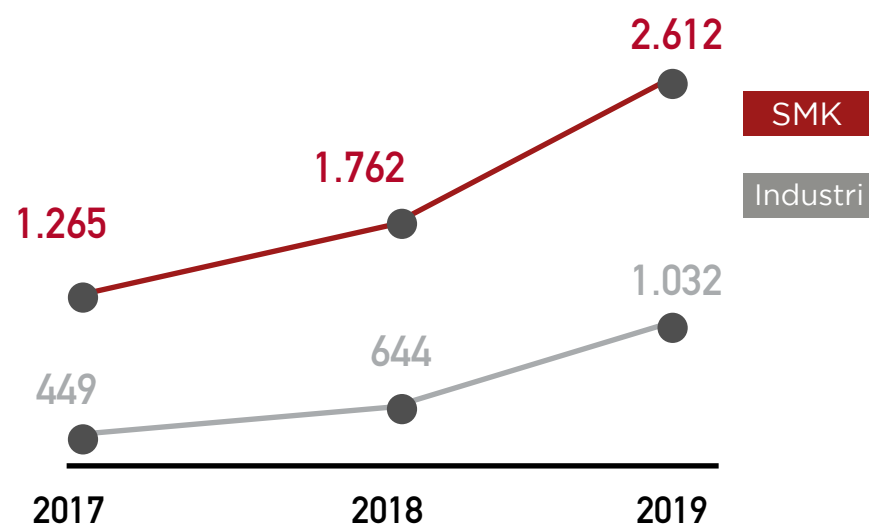
Revitalisasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi

Keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan industri terus didorong pemerintah. Daya saing talenta kita pun semakin menunjukkan perbaikan.

Global Talent Competitiveness Index (Vocational Training)



Jumlah Industri yang Terlibat Kerjasama dengan SMK



Data: Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian



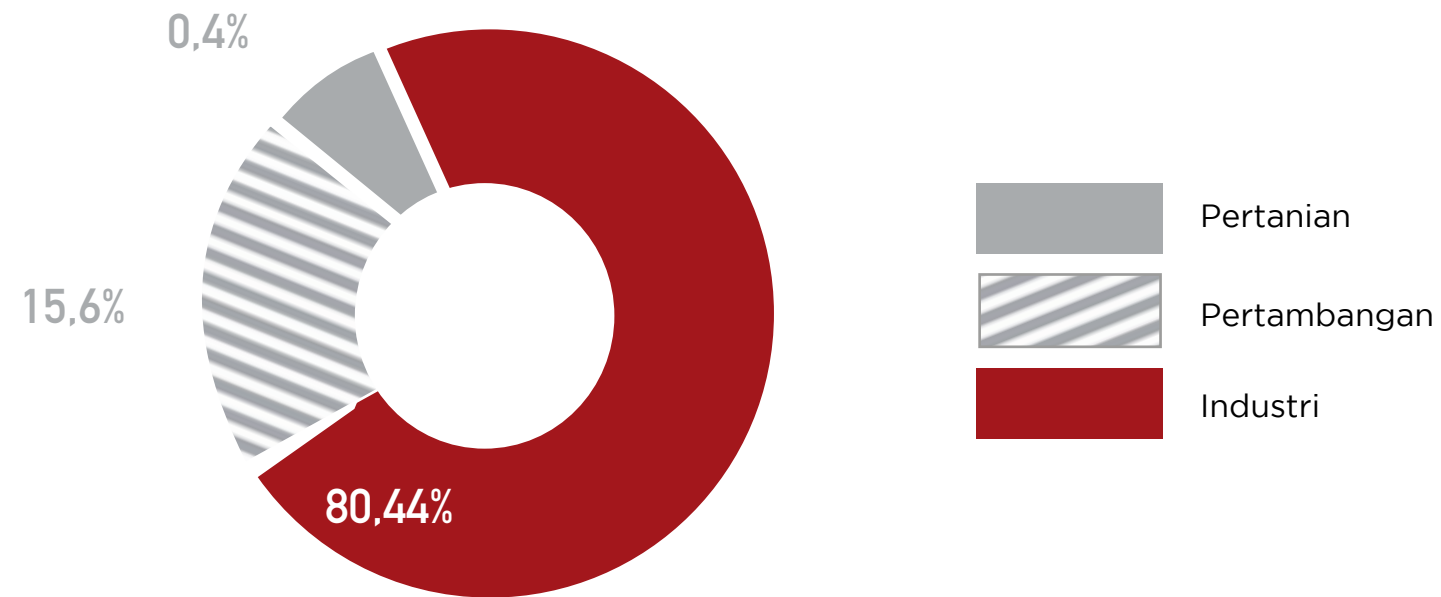
Sejumlah buruh pabrik mobil milik PT Honda Prospect Motor tetap bekerja di Karawang, Jawa Barat (Foto: ANTARA FOTO/Ujang Zaelani)

PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

Sektor Industri Tetap Dominan

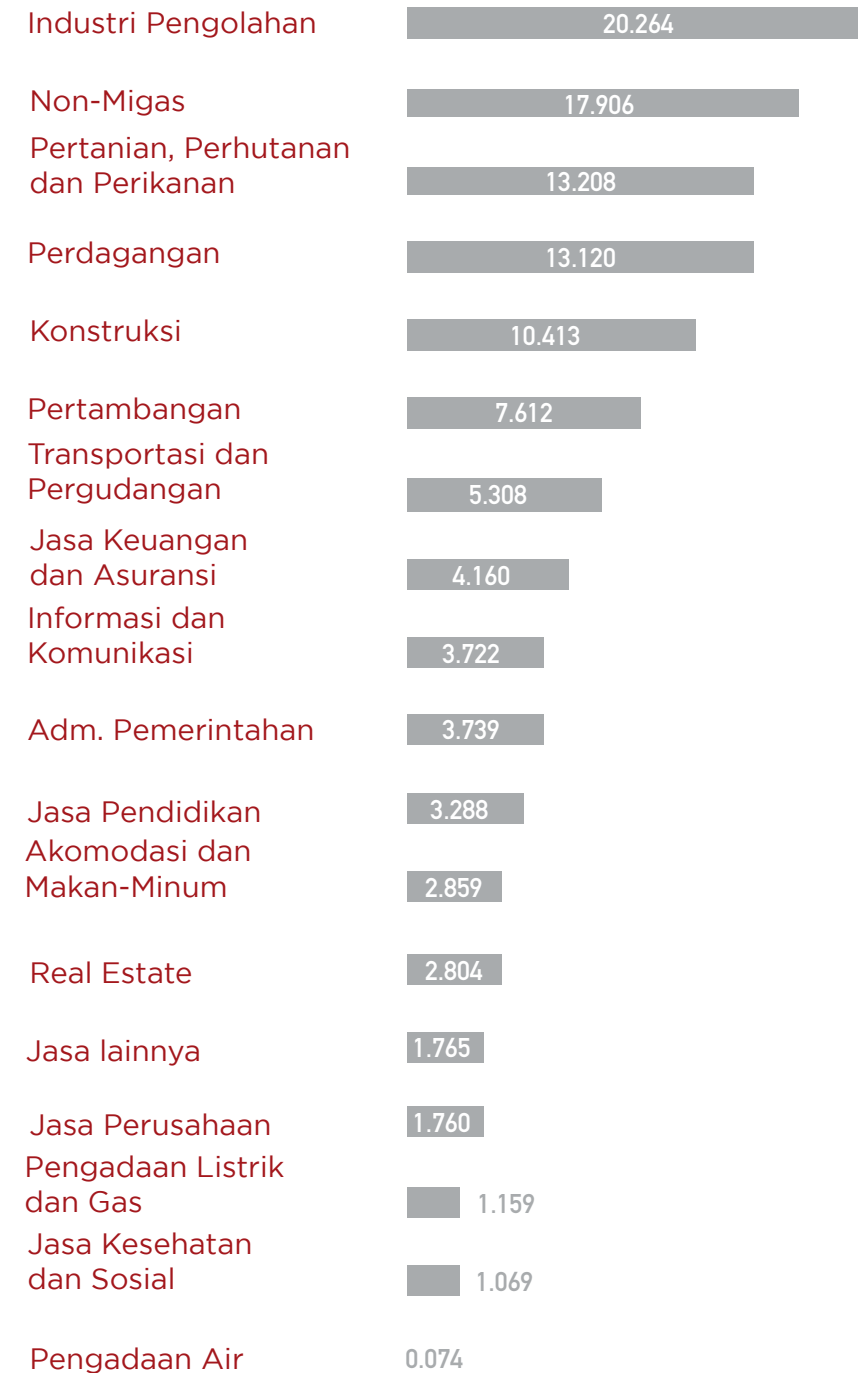
Industri manufaktur masih menjadi kontributor utama perekonomian, baik terhadap PDB maupun ekspor non-migas dalam kurun waktu 2015-2019.

Proporsi Ekspor Non-Migas (%)
2015-2018



Data: Kementerian Perindustrian

Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDB (%)
Rata-rata 2015-2019 (SM 1)



Pekerja menyelesaikan produksi baju di CV Lima Satria di Gedebage, Bandung, Jawa Barat (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Kemudahan Berusaha

Pemerintah terus mengupayakan kemudahan usaha baik di level nasional maupun daerah, sehingga daya tarik Indonesia di mata investor semakin meningkat. Hal ini terutama disebabkan proses penyederhanaan perizinan yang terus menerus dilakukan.



*Mempermudah dunia usaha mulai dari perizinan hingga penyelesaian perselisihan di pengadilan
(Foto: Kementerian ESDM)*

KEMUDAHAN BERUSAHA

Langkah Maju Deregulasi

Peraturan yang tidak rumit memberi ruang luas bagi investasi dan dunia usaha untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.



OSS mengubah sistem manual menjadi sistem elektronik terintegrasi yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2018

OSS menciptakan iklim berusaha yang kompetitif dan efisien.

Data: Kemenko Perekonomian

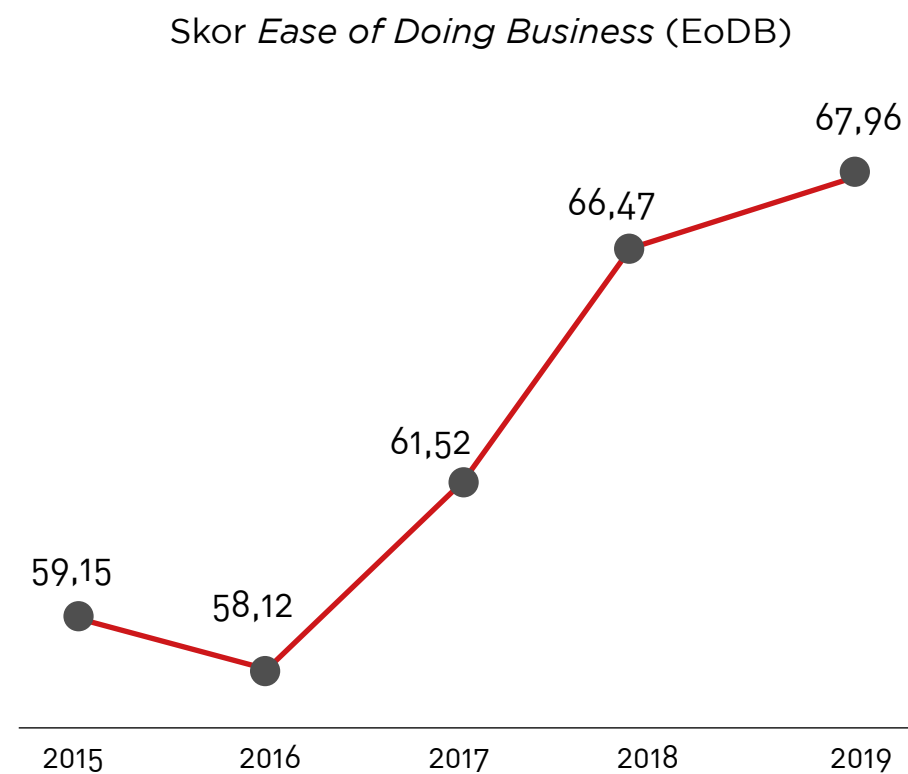


Foto Aerial MRT di Fatmawati, Jakarta Selatan (Foto: Youtube Presiden Joko Widodo)

KEMUDAHAN BERUSAHA

Kemudahan Berusaha Meningkatkan

Kenaikan skor *Ease of Doing Business* (EoDB) adalah wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi.



Data: Bank Dunia



Sejumlah pekerja mengerjakan produksi garmen di pabrik PT. Eco Smart Garment Indonesia di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah (Foto: ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho)

KEMUDAHAN BERUSAHA

Indonesia Layak Investasi

Sejak 2017 Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan peringkat layak investasi oleh tiga lembaga pemeringkat internasional ternama.

Pada 31 Mei 2019, S&P menaikkan rating Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB-

2 0 1 4		2 0 1 9	
	Layak Investasi		Layak Investasi
Moody's	✓	Moody's	✓
Fitch	✓	Fitch	✓
Standard & Poor's	✗	Standard & Poor's	✓

Data: Moody's, Fitch, dan S&P



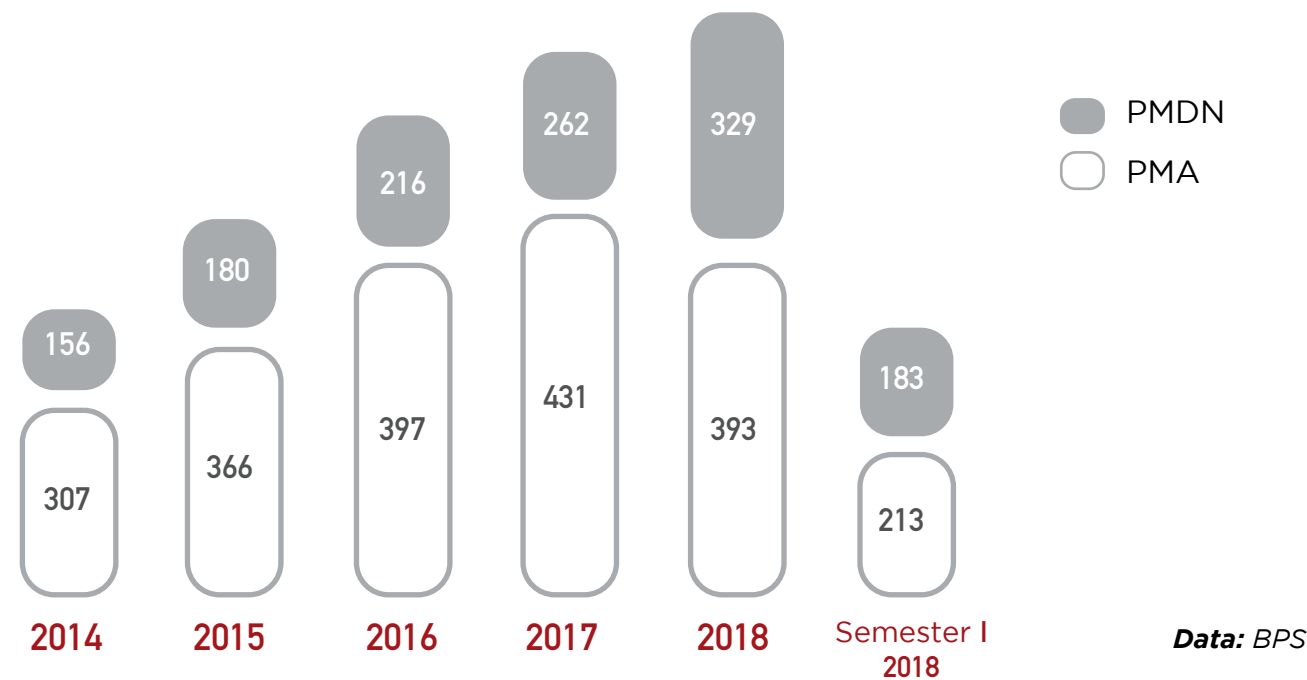
Foto Aerial GBK Senayan, Jakarta
(Foto: Dok. Kantor Staf Presiden)

KEMUDAHAN BERUSAHA

Realisasi Investasi Meningkat

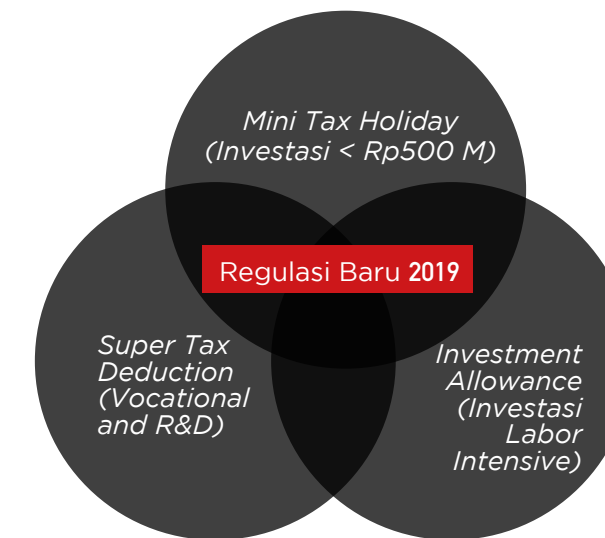
Dari tahun ke tahun total realisasi investasi menunjukkan tren meningkat. Meskipun terjadi sedikit penurunan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat. Sebanyak 5,46 juta tenaga kerja terserap selama 2015 hingga Semester I 2019. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *Super Tax Deduction* di tahun 2019.

Realisasi investasi (Triliun Rp)



Sejumlah Mitra Pengemudi antri untuk mendapatkan jaket berlogo baru Gojek saat Festival Apresiasi Mitra di Surabaya, Jawa Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Terobosan Kebijakan 2019



Data: Kementerian Keuangan

7.
Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi dengan
Menggerakkan Sektor-sektor
Strategis Ekonomi Domestik



*Pekerja memproduksi kopiah M'Iming
di Bandung, Jawa Barat.
(Foto: ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho)*

Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata akan tetap memainkan peranan penting di tengah perubahan ekonomi yang serba cepat dan disruptif.



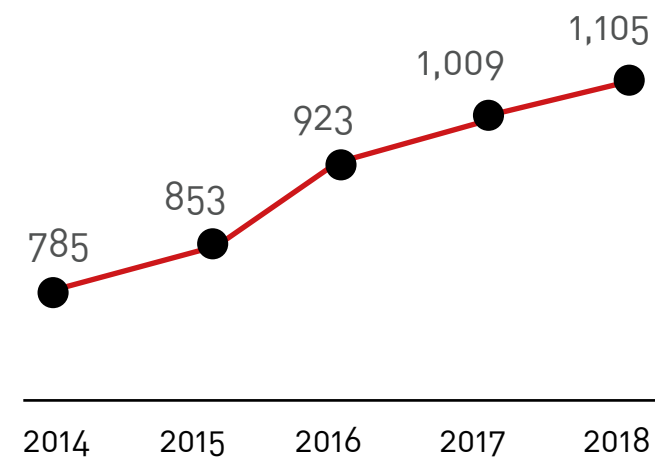
Model membawakan pakaian rancangan Gee Batik dalam perhelatan Jakarta Fashion Week 2018 di Senayan City, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA

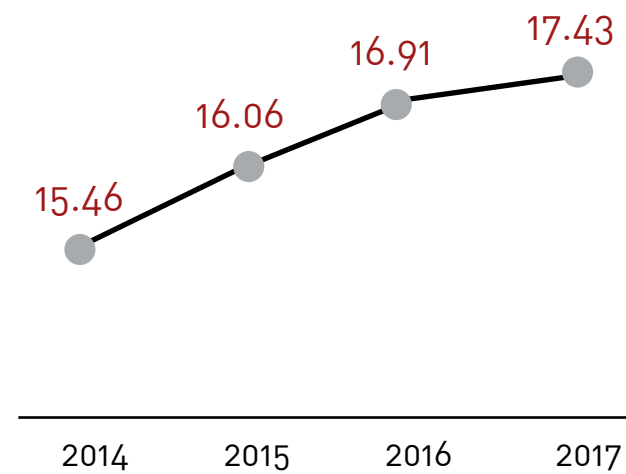
Geliat Ekonomi Kreatif

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif terus meningkat. Kontribusi sektor ini dalam perekonomian nasional semakin penting.

PDB Sektor Ekonomi Kreatif
(Triliun Rupiah)



Jumlah Penduduk Bekerja pada
sektor Ekonomi Kreatif (juta orang)



Data: BEKRAF



Sejumlah model mengenakan baju dari berbagai perancang yang mengkhususkan membuat fesyen hijab dalam perhelatan Jakarta Fashion Week 2018 di Senayan City, Jakarta.
(Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA

Ekonomi Digital Berkembang Pesat

Pemerintah memfasilitasi bertumbuhkembangnya ekonomi digital yang telah melahirkan sejumlah perusahaan lokal dengan nilai valuasi milyaran dolar AS. Hingga tahun 2020 sektor ini diperkirakan akan menyerap hingga 16 juta tenaga kerja.



Estimasi valuasi (Mei 2018):
US\$ 5 Bn (Rp69,4 Triliun)



Estimasi valuasi (Mei 2018):
US\$ 1.062 Bn (Rp15 Triliun)



Estimasi valuasi (Mei 2018):
US\$ 2 Bn (Rp28 Triliun)



Estimasi valuasi (Mei 2018):
US\$ 1 Bn (Rp14 Triliun)

Data: Opus dan Mc Kinsey

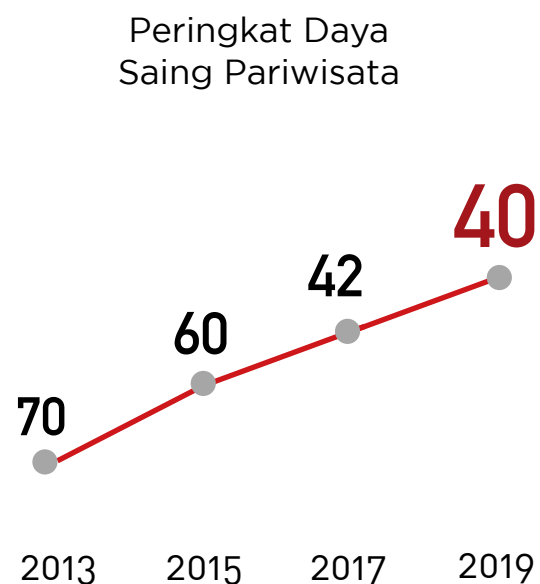
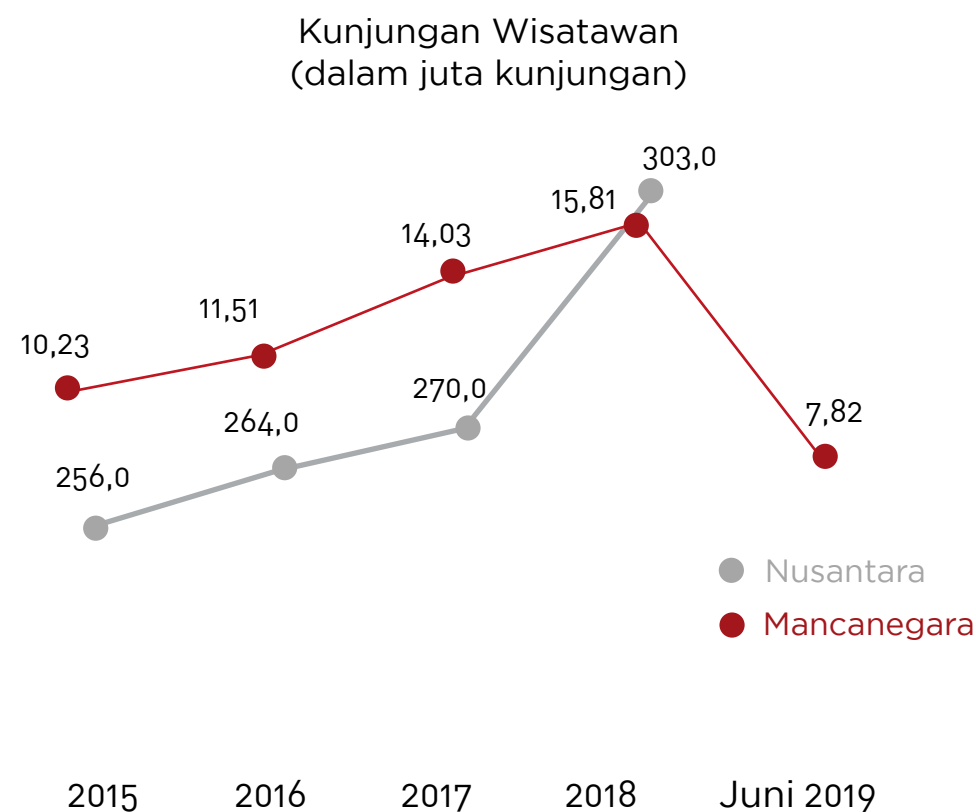


Unicorn Start-up dalam negeri.
(Foto: Dok. Kantor Staf Presiden)

EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA

Pariwisata adalah Primadona

Sektor pariwisata menjadi andalan Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, terutama bagi ekonomi lokal dan penerimaan devisa. Daya saing pariwisata Indonesia terus meningkat.



Data: Kementerian Pariwisata dan WEF



Sejumlah turis asing asal Belanda mengunjungi Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah (Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Ekonomi Maritim

Pemerintah terus berupaya mengembangkan ekonomi maritim, melalui penegakan hukum di sektor maritim dan memperkuat infrastruktur pendukung dalam ekonomi maritim



*Kapal nelayan melintasi perairan Selat Malaka di Lhokseumawe, Aceh
(Foto: ANTARA FOTO/Rahmad)*

EKONOMI MARITIM

Kedaulatan Maritim

Kejayaan maritim sangat ditentukan oleh tegaknya kedaulatan di laut. Selama lima tahun, ratusan pelaku *illegal fishing* telah ditangkap dan diproses hingga ke peradilan.

824

Pelaku *Illegal Fishing* yang ditangkap

188

Kasus yang diproses di Peradilan

636

Kasus yang selesai

Data: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Empat buah kapal asal Filipina diledakkan ditengah kabut asap di wilayah Gosong Melulun perairan Tarakan lintang selatan, Kalimantan Utara, (Foto: ANTARA FOTO/ Fadlansyah)

EKONOMI MARITIM

Pembangunan Ekonomi Maritim

Kesejahteraan di sektor maritim terus ditingkatkan oleh Pemerintah melalui pembangunan pelabuhan, penyediaan kapal, hingga pembiayaan dan asuransi untuk nelayan.

CAPAIAN EKONOMI MARITIM

12.581

penerima manfaat asuransi nelayan

1.3 triliun

Alokasi Anggaran Bank Mikro Nelayan

295

Kapal Baru dibangun

61

Pelabuhan Baru dan Revitalisasi

46

Peringkat *Logistic Performance Index*

294

Kabupaten/Kota Penerima Asuransi Nelayan

Data: Kementerian Kelautan dan Perikanan



Foto udara kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA/ Oky Lukmansyah)



Penerima Bantuan Konversi Solar Menjadi Elpiji untuk Nelayan di Cilacap, Jawa Tengah
(Foto: Kementerian ESDM)



Konversi Solar Menjadi Elpiji untuk Nelayan di Cilacap, Jawa Tengah
(Foto: Kementerian ESDM/ Lilik Darmawan)

SOSIAL BUDAYA

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan. Kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Pemerintah mendorong kebangkitan karakter manusia Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan prestasi bangsa sebagai salah satu pusat peradaban dunia serta penghargaan terhadap kebinekaan menjadi prioritas bidang sosial-budaya.



Turis asing belajar tatah sungging wayang kulit di stan Kampung Wisata Wayang Desa Kepuhsari saat pameran produk unggulan Wonogiri di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya)

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa



Guru mengajar siswa baru kelas 1 di SD Negeri 3 Jepun yang hanya berjumlah delapan siswa dalam satu kelas di Tulungagung, Jawa Timur, (Foto: ANTARA FOTO/ Destyan Sujarwoko)

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pembangunan di bidang fisik dan pengembangan ekonomi di banyak tempat diiringi dengan pemastian pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga setiap bangsa menjadi lebih siap menggapai kemajuan.



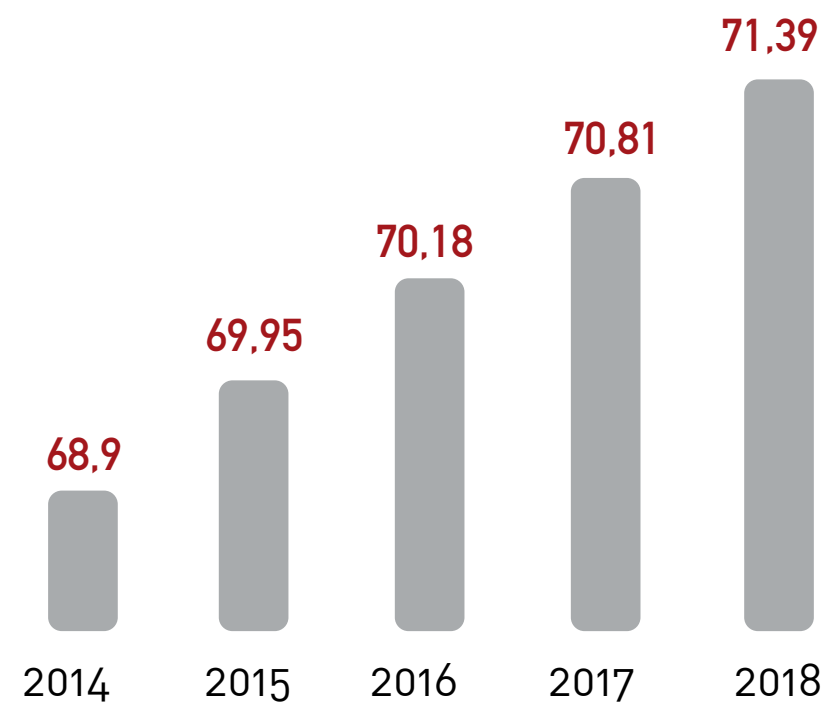
*Keluarga Penerima Manfaat saat acara Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gor Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
(Foto: ANTARA FOTO/ Adeng Bustomi)*

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Kualitas Manusia Indonesia

Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum sudah berada di jalur yang tepat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Data: BPS



Anak-anak membawa bendera merah putih di desa pantai pulau Ndao, Rote, Nusa Tenggara Timur.
(Foto: ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa)

PEMEMUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pelaksanaan Bantuan Sosial

Penurunan angka kemiskinan merupakan hasil dari sebuah pendekatan komprehensif, terutama melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.



18,9 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar



10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan



96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat

Data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan



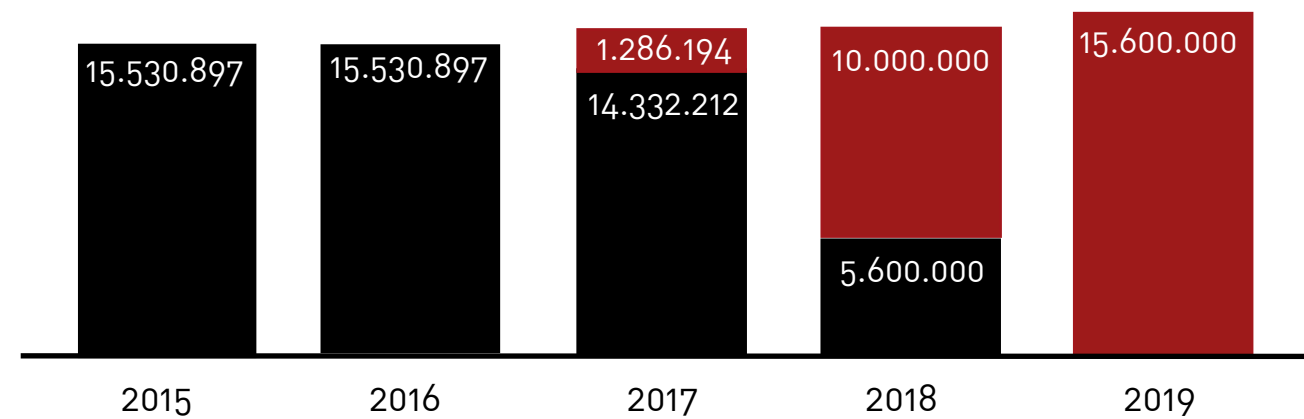
Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran KKS perdana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aceh Utara. (Foto: ANTARA FOTO/Rahmad)

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Reformasi Sistem Bantuan Sosial

Agar memenuhi 6T (tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi) maka Pemerintah mengubah mekanisme bantuan sosial secara bertahap, dari Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017.

Keluarga Penerima Manfaat BPNT (kpm)



Data: Kementerian Sosial



Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera saat mengikuti peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Olahraga POPKI, Cibubur, Jakarta. (Foto: TEMPO/Subekti)

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi makin komprehensif dengan diberlakukannya BPJS Ketenagakerjaan yang telah mencakup puluhan juta peserta.



Hingga Juni 2019,

51.115.597 orang

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Data: Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Lima Tahun Maju Bersama



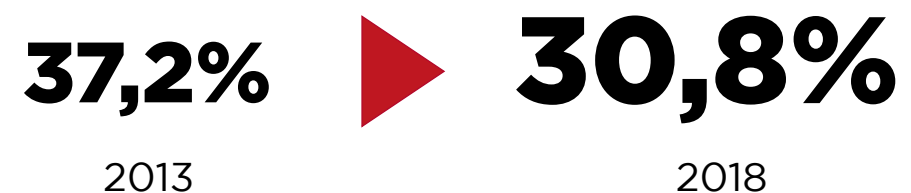
Pekerja menyanyikan lagu penyemangat di sela-sela kerjanya di salah satu pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/Herka Yanis Pangaribowo)

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Menyelamatkan 1,7 Juta Balita dari *Stunting*

Terobosan kebijakan, kerja bersama berbagai pemangku kepentingan dan kampanye nasional dengan penekanan pada pola asuh, makan, dan sanitasi menjadi penentu keberhasilan penurunan prevalensi *stunting*.

Prevalensi *stunting* turun



Indikator Keberhasilan

- | | |
|--|---|
| 1. pemeriksaan kehamilan | 3. perilaku benar cuci tangan pakai sabun |
| 2. berat bayi lahir di atas 2.500 gram | 4. perilaku benar buang air besar |

Data: Kementerian Kesehatan



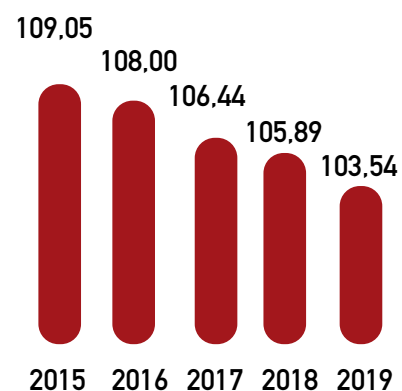
Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo pada Kampanye Cegah Stunting di Posyandu Bantargadung, Sukabumi
(Foto: Dok. Kantor Staf Presiden)

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

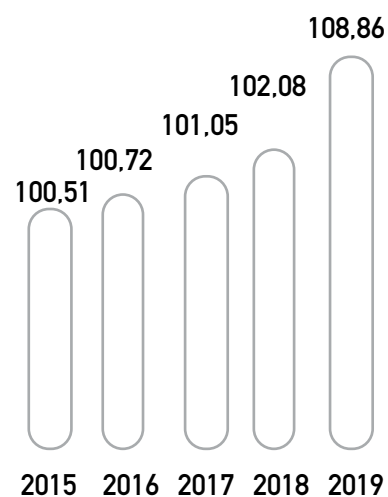
Akses Pendidikan Merata

Selama 5 tahun terakhir, kesempatan untuk mengenyam pendidikan telah dibuka selebar mungkin. Namun ada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara global yang diukur dengan PISA.

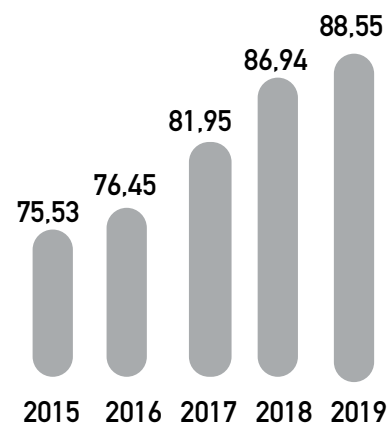
APK SD



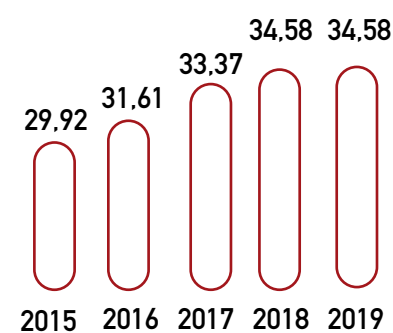
APK SMP/ MTs



APK SMA/SMK/MA



APK PT



*PISA adalah instrumen yang digunakan OECD untuk mengukur kualitas pendidikan siswa usia 15 tahun dalam hal membaca, matematika, dan sains.

*APK: Angka Partisipasi Kasar

Data: Kementerian Pendidikan



Sejumlah siswa mengikuti kampanye "Stop Bullying" di Medan, Sumatera Utara, (Foto: ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Pemberdayaan, Inovasi, Prestasi

Kemajuan sebuah bangsa akan tercermin dari geliat yang dilakukannya secara kolektif untuk terus melakukan pemberdayaan, melakukan inovasi, dan mengukir prestasi.



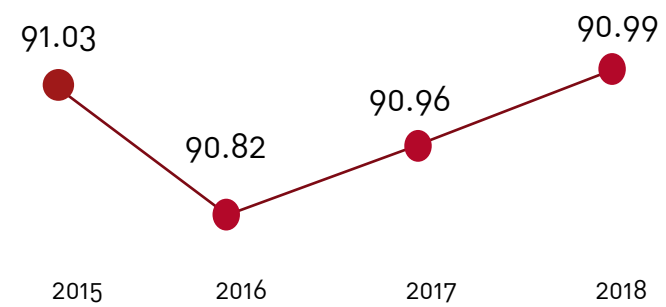
Pesta kembang api menyemarakkan Upacara Pembukaan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, (Foto: INASGOC/Widodo S Jusuf).

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

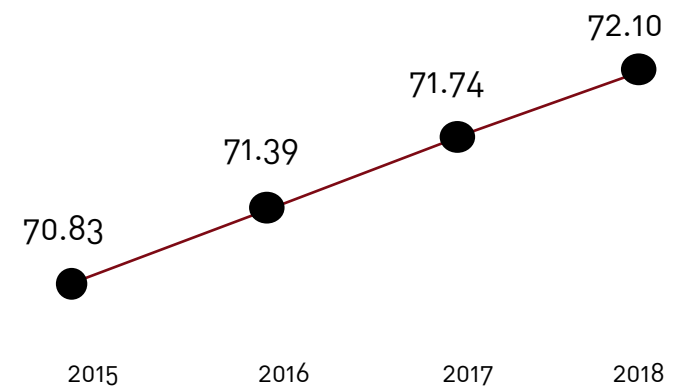
Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Pemerintah terus memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk memperbaiki kemandirian ekonomi perempuan melalui industri rumahan yang telah menjangkau 3.764 pelaku usaha.

Indeks Pembangunan Gender



Indeks Pemberdayaan Gender



Data: BPS



Pekerja mengemas jenang kelapa di industri rumahan jenang kelapa muda Denanyar, Jombang, Jawa Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

Ruang Perlindungan Anak

Kemajuan dan kesejahteraan Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak dengan memastikan keberhasilan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak

Hingga tahun **2018**, pemerintah telah membangun

520 Kabupaten/Kota Layak Anak

Data: Kementerian PPPA



Anak-anak bermain egrag/batok di sekolah alam Kampung Baca Taman Rimba (Gatara) di Paoring Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.
(Foto: ANTARA FOTO/Budi Canira Setya)

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

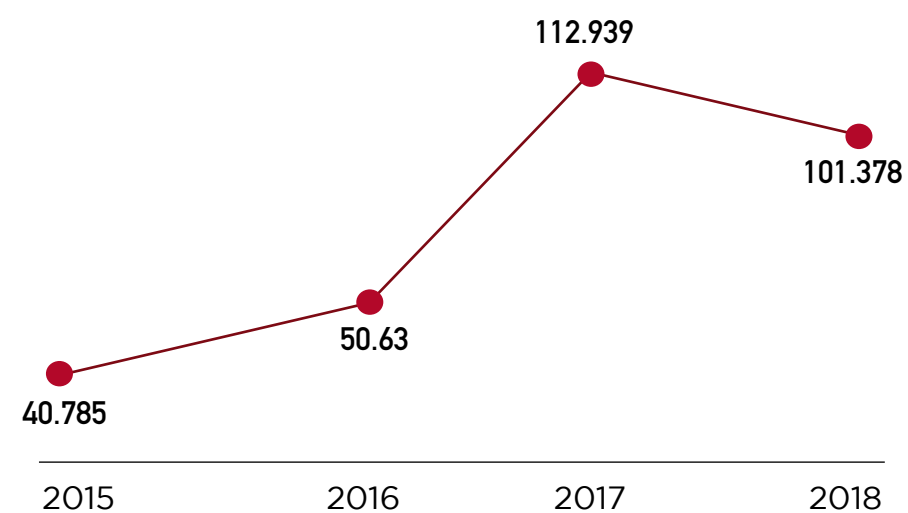
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Sejak tahun 2018, pemerintah membuka kesempatan pada para penyandang disabilitas untuk berbakti pada negeri melalui seleksi penerimaan CPNS.



Pekerja penyandang disabilitas menyelesaikan pembuatan mainan anak-anak berbahan dasar kayu di Mandiri Craf, Bantul, Yogyakarta. (Foto: ANTARA FOTO/ Yanis Pangaribowo)

Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Program Keluarga Harapan (orang)



646 orang

Penerimaan CPNS Formasi Penyandang Disabilitas Tahun 2018

Data: Kementerian Sosial dan Badan Kepegawaian Negara



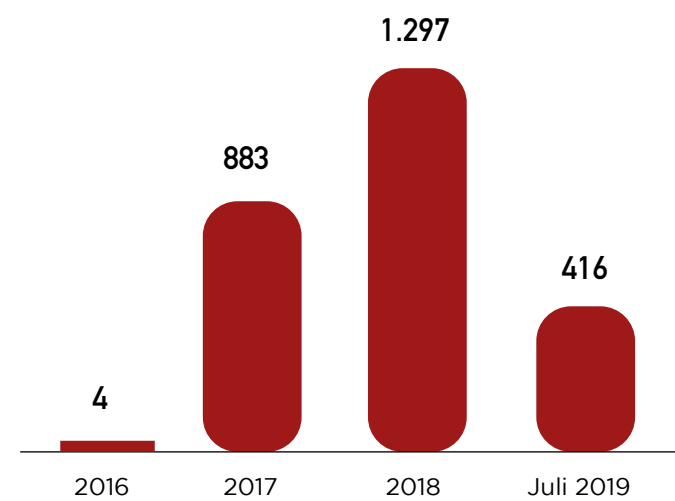
Penyandang disabilitas peserta program pendidikan dan pelatihan (diklat) mengikuti praktik membuat alas sepatu di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil, Solo, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya)

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

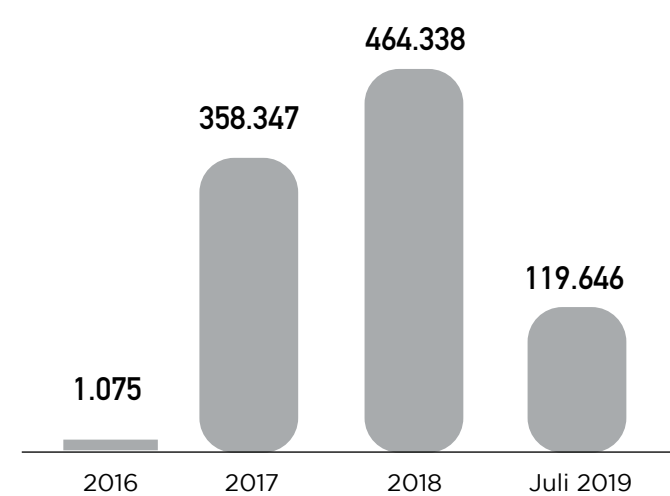
Pembiayaan untuk yang Tak Terjangkau Perbankan

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) memberdayakan masyarakat yang tak bisa dijangkau perbankan. Selain itu ada skema pendanaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang jumlah nasabahnya sudah mencapai 5,3 juta (hingga Sep 2019). Pada 2019 penyaluran Mekaar mencapai Rp. 12,75 Triliun.

Penyaluran Pembiayaan UMi (Miliar Rupiah)



Jumlah Debitur UMi (orang)



Data: PNM



Pekerja menyelesaikan pembuatan dompet di industri rumahan sentra dompet dan tas Dusun Grogolan, Desa Rejoslamet, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Syaiful Arif).

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

Prestasi Asian Games 2018 dan Optimisme Bangsa

Prestasi atlet di Asian Games 2018 adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Indonesia menempati peringkat ke-4 di Asian Games dengan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu.

31

Emas

24

Perak

43

Perunggu

Data: INASGOC

Lifter Indonesia Eko Yuli Irawan melakukan penghormatan saat bertanding pada nomor angkat besi putra 62 kg Asian Games ke-18 2018 di JiExpo, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/ INASGOC/Dhomas Reviyanto)

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

Mengharumkan Nama Bangsa di Asian Para Games 2018

Kerja keras dan perjuangan para atlet disabilitas kita berbuah manis di Asian Para Games. Mereka meraih peringkat ke-5 dengan perolehan 37 medali emas, 47 medali perak, dan 51 medali perunggu.

37

Emas

47

Perak

51

Perunggu

Data: INAPGOC

Sprinter Indonesia Karisma Evi Tiarani (tengah) memacu kecepatan saat berlaga dalam nomor 100 meter putri T42 dan T63 Asian Para Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

Pengembangan Riset dan Teknologi

Riset, pengembangan teknologi, dan inovasi di bidang ilmu alam dan ilmu sosial adalah kunci keunggulan sebuah bangsa. Ketiganya perlu dikelola secara lebih komprehensif agar Indonesia melahirkan banyak talenta berkelas dunia.

6.584 Hak Kekayaan Intelektual

telah didaftarkan hingga 2018

Data: Kementerian Ristek Dikti



Qonita Kurnia Anjani, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin (Unhas), meracik campuran obat temuannya di laboratorium farmasi Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar (Foto: TEMPO/Iqbal Lubis)

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

Kesejahteraan Veteran

Pengakuan dan penghargaan terhadap para pejuang bangsa di masa lalu, merupakan tolok ukur dan cermin kebesaran sebuah bangsa. Pengakuan tersebut perlu dijaga keberlanjutannya sehingga mereka yang telah berjasa bagi bangsa di bidang apapun tetap dapat menikmati kehidupan yang layak di hari tua mereka.

Sejumlah veteran pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Legiun Veteran Padangpariaman memberikan hormat saat penaikan bendera merah-putih, Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-67, di halaman Kantor Bupati Padangpariaman, Sumbar. (Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra)

PEMBERDAYAAN, INOVASI DAN PRESTASI

Prestasi Prajurit

Secara konsisten TNI AD selalu menjadi juara umum Lomba Tembak *Australian Army Skill At Arms Meeting* (AASAM).

Jumlah Medali pada
AASAM 2019

21	14	10
Emas	Perak	Perunggu

Data: Pusat Penerangan TNI AD



Kontingen lomba tembak TNI AD berfoto bersama saat tiba di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Kearifan Lokal dan Keberlanjutan

Di tengah-tengah dunia yang kompetitif dan terus berubah, kearifan lokal serta berbagai inisiatif untuk memastikan keberlanjutan budaya dan lingkungan menjadi tiang penyangga yang kokoh sebuah bangsa



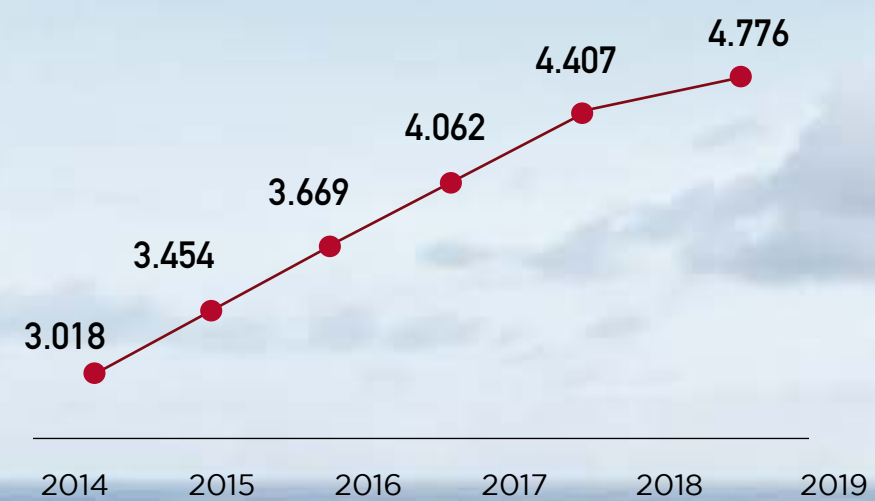
Sejumlah warga mengusung "Gebogan" yang tersusun dari produk pertanian lokal saat pawai pembukaan Festival Budaya Pertanian 2019 di Desa Pelaga, Badung, Bali. (Foto: ANTARA FOTO/ Fikri Yusuf)

KEBERLANJUTAN DAN KEARIFAN LOKAL

Mewujudkan Indonesia Hijau

Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh komitmen dan konsistensi untuk mulai memanfaatkan energi baru dan terbarukan.

Total Kapasitas Pembangkit EBT (MW)



Data: Kementerian ESDM

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo
Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan
(Foto: Kementerian ESDM)



*Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan
(Foto: Kementerian ESDM)*



*Pekerja pada Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal
(Foto: Kementerian ESDM)*

KEARIFAN LOKAL DAN KEBERLANJUTAN

Menurunkan Emisi Melalui Kendaraan Bermotor Listrik

Ketergantungan pada BBM harus mulai dihentikan. Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah jawabannya, yang sekaligus akan mendorong industri kendaraan listrik nasional.

Pasal 19

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) dapat berupa:

**Insentif pajak penjualan atas barang mewah;
insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah;**

Data: Kementerian ESDM



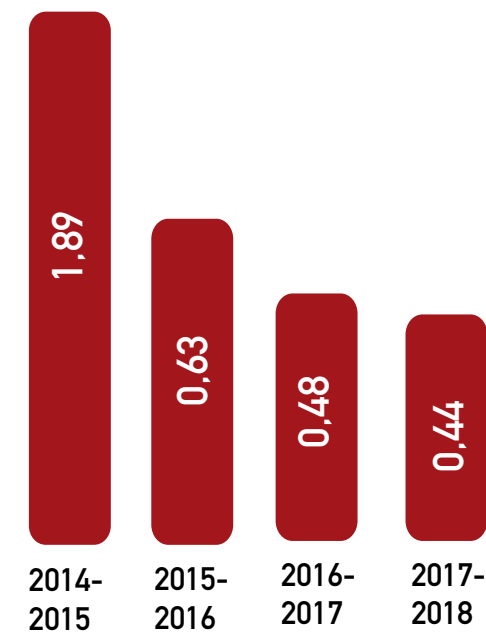
Presiden Joko Widodo menjajal motor listrik buatan dalam negeri 'Gesits' sesuai melakukan audiensi dengan pihak-pihak yang terlibat proses produksi di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

KEARIFAN LOKAL DAN KEBERLANJUTAN

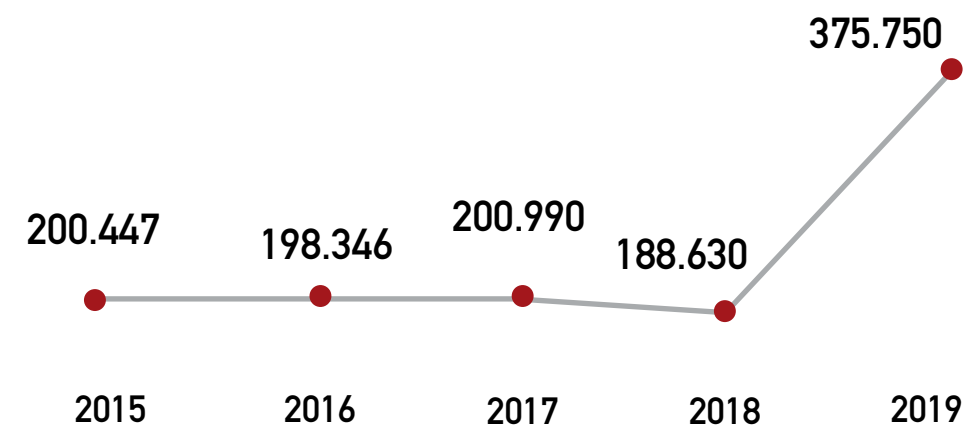
Menjaga Hutan Kita

Tata kelola hutan yang semakin baik, berorientasi tapak, dan menumbuhkan kepercayaan publik. Ditandai dengan laju penyusutan hutan yang menurun dan luas rehabilitasi hutan yang meningkat.

Laju penyusutan hutan
(juta ha per tahun)



Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)



Data: Kementerian LHK



Danau Laot Bangko di Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Foto: Kementerian LHK)

KEARIFAN LOKAL DAN KEBERLANJUTAN

Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya menurunkan luas kebakaran hutan sejak tahun 2015 dilakukan secara bersama di tingkat tapak yang melibatkan aparat pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat. Upaya tersebut juga didukung dengan teknologi modifikasi cuaca dan *water bombing*.

Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

415 posko

50 unit pesawat

1.414 jangkauan

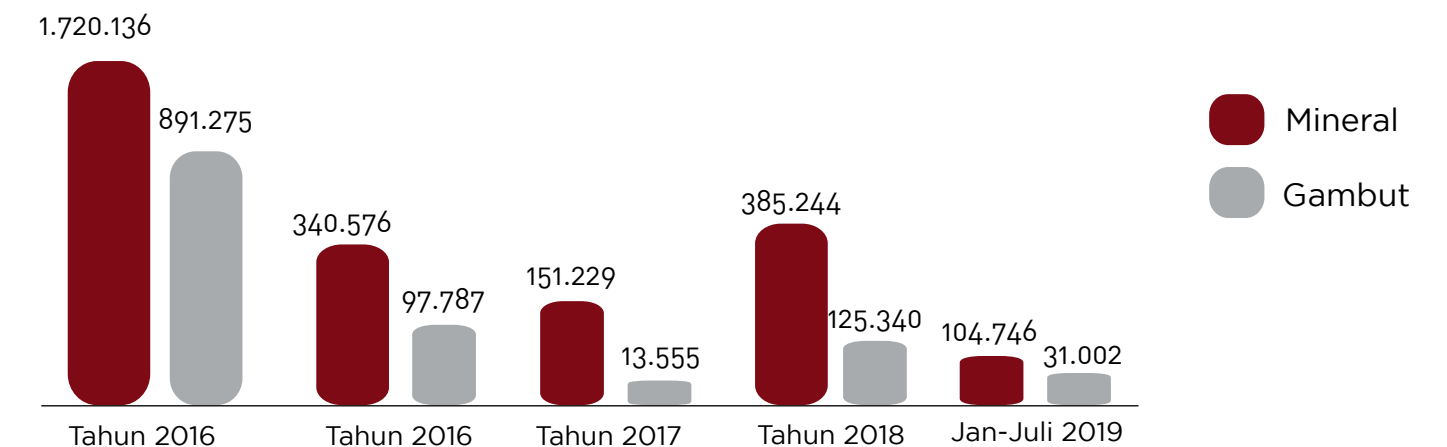
263.165.874 liter *water bombing*

162,4 ton garam modifikasi cuaca



Sejumlah personel pemadam kebakaran dari PT Sumatera Riang Lestari melakukan proses pemadaman kebakaran hutan yang berbatasan dengan konsesi perusahaan di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Riau. (Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (ha)



Data: Kementerian LHK

KEARIFAN LOKAL DAN KEBERLANJUTAN

Memastikan Hak Rakyat atas Tanah

Percepatan Reforma Agraria dilakukan dengan meningkatkan koordinasi K/L dan Pemda, melakukan redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek *land reform* dan mewajibkan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Capaian
Redistribusi Tanah
2015-Juni 2019

558.700 bidang
418.748 Ha

Capaian
Legalisasi Tanah
2015-Juni 2019

14.223.763 bidang
3.641.937 Ha

Data: Kementerian ATR/BPN



Pembagian Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bogor, Jawa Barat (Foto: Sekretariat Presiden)

KEARIFAN LOKAL DAN KEBERLANJUTAN

Akses Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah kebijakan inovatif Pemerintah untuk memberikan hak dan akses pengelolaan lahan kepada masyarakat kurang mampu.

Perhutanan Sosial yang terealisasi:



Data: Kementerian LHK



Memetik manfaat dengan membudidayakan kopi sehingga menjadi sentra ekonomi baru di Hutan Desa Tibussan. Latimojong, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan (Foto: Kementerian LHK)



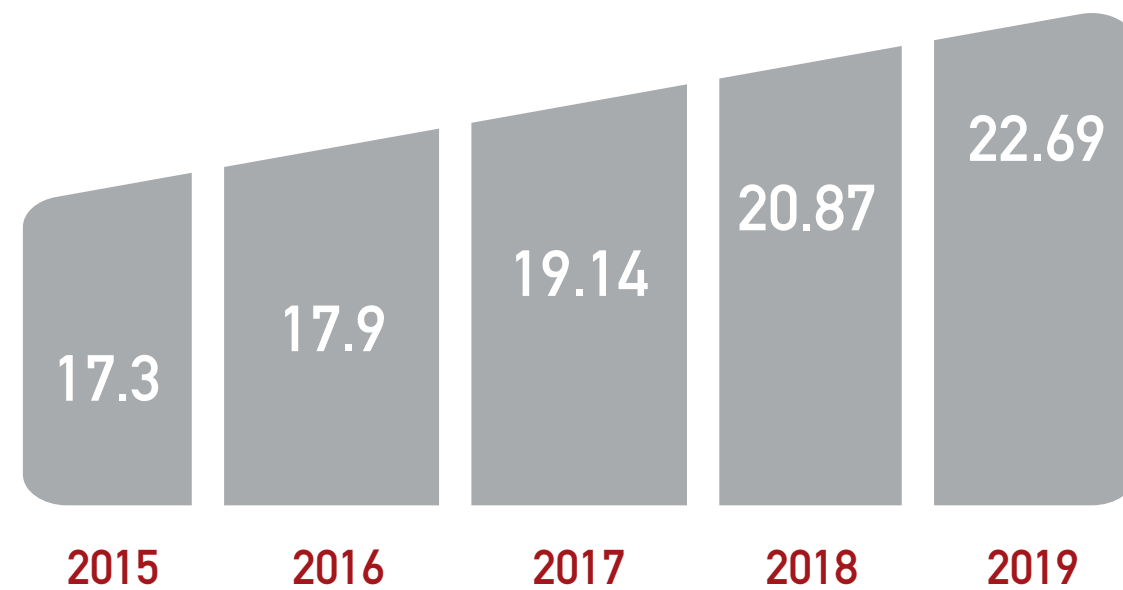
Harmoni dalam mengelola potensi alam. Menanam kopi dan menjaga hutan tepat berada di bawah kaki Gunung Latimojong, Desa Tibussan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan. (Foto: Kementerian LHK)

KEARIFAN LOKAL DAN KEBERLANJUTAN

Melindungi dan Memanfaatkan Potensi Laut

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut sehingga pengelolaan laut dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Luas kawasan konservasi
(juta hektar)



Data: Kementerian KKP



Sekelompok ikan melintas di spot Ibel
Taman Nasional Takabonerate, Selayar, Sulawesi Selatan
(Foto: TEMPO/Iqbal Lubis)

9.
Memperteguh Kebinekaan
dan Memperkuat Restorasi
Sosial Indonesia.



Sejumlah siswa mengarak lambang Garuda Pancasila dalam acara Parade Kolosal kebangsaan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

SPIRIT KEBINEKAAN

Pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan

Sejak Juli 2018, status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

65.157 KTP elektronik

telah diterbitkan hingga
April 2019

Data: Kementerian Dalam Negeri



*Penghayat kepercayaan memperlihatkan KTP yang sudah mengakui hak mereka
(Foto: Kementerian Dalam Negeri)*

SPIRIT KEBINEKAAN

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Sejak tahun 2018, hak hutan adat bagi masyarakat adat telah dilindungi oleh Pemerintah.

Sampai dengan Agustus 2019
telah ditetapkan:

Hutan Adat seluas

574.221 Ha

Data: Kementerian LHK



Presiden Joko Widodo menerima sematan Kain Ulos khas Batak dari perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta (Foto: ANTARA FOTO/ Widodo S. Jusuf)

SPIRIT KEBINEKAAN

Meneguhkan Keberagaman Melalui Upacara Kemerdekaan

Kebinekaan Indonesia dapat dirawat melalui kemeriahan peringatan hari kemerdekaan.

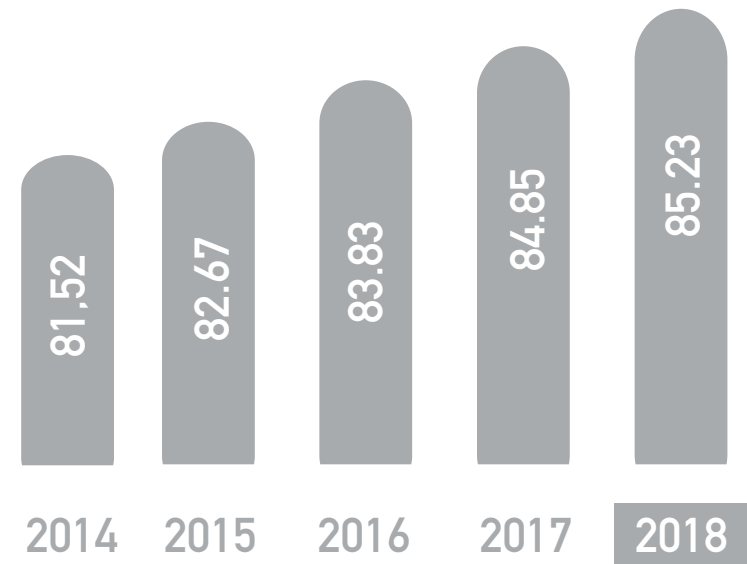
*Sejumlah pemuda memakai pakaian adat saat mengikuti upacara bendera di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur.
(Foto: ANTARA FOTO/Moch Asim)*

SPIRIT KEBINEKAAN

Peningkatan Pelayanan Haji

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Perkembangan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia 2014-2018



Penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (juta rupiah)



Data: Kementerian Agama



Jemaah calon haji naik ke pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Foto: TEMPO/STR/Iqbal Lubis)

SPIRIT KEBINEKAAN

Mudik 2019

Semakin terkoneksi jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera, mempermudah tanggung jawab Pemerintah untuk menyelenggarakan mudik yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Kecelakaan Lalu Lintas (kejadian)



Data: POLRI



Sejumlah kendaraan pemudik melintas di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

SPIRIT KEBINEKAAN

Warisan Budaya Tak Benda

Kekayaan budaya Indonesia dikenal bukan saja karena warisan benda-benda bersejarah, namun juga karena tradisi lisan dan kebiasaan masyarakat lainnya yang diakui oleh dunia.

*pekerja menyelesaikan pembuatan kapal di kawasan pembuatan Phinisi, Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
(Foto: ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)*

SPIRIT KEBINEKAAN

Festival Budaya

Perayaan dan kegembiraan adalah bagian penting dalam pelestarian kebudayaan. Modal berharga untuk membangun optimisme dan pada saat yang sama, kebanggaan.

Sejumlah penari menampilkan tari kolosal yang berjudul Rantrak Saragam Mayintang Bumi saat mengikuti Festival Pesona Budaya Minangkabau 2016 di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)



“PERTAMA, pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

KEDUA, pembangunan sumber daya manusia. Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ!

Kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Kita juga akan membangun lembaga Manajemen Talenta Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.

Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global.

KETIGA, kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan.

KEEMPAT, sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!

Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan!

Tidak ada lagi pola pikir lama! Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, dan Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif.

KELIMA, kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap Rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.”

*Presiden Joko Widodo
pada Pidato Visi Indonesia
Sentul, 14 Juli 2019*

LIMA TAHUN MAJU BERSAMA

Laporan ini disusun atas kerja sama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dukungan dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara



Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Gedung Bina Graha Jl Veteran No. 16 Jakarta 10110
(021) 2354 5001
www.ksp.go.id